



**REAKSI KOREA SELATAN TERHADAP PENINGKATAN PERCOBAAN
SENJATA NUKLIR KOREA UTARA**

The South Korea's Reaction's Towards The North Korea's Nuclear

SKRIPSI

Oleh:

RUTH JENNY K.S.

120910101031

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS JEMBER

2018



**REAKSI KOREA SELATAN TERHADAP PENINGKATAN PERCOBAAN
SENJATA NUKLIR KOREA UTARA**

The South Korea's Reaction's Towards The North Korea's Nuclear

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh:

RUTH JENNY K.S

120910101031

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2018

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan karunia yang tiada berkesudahan yang telah diberikan-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua Orangtua saya, Ayahanda E. Silalahi dan Ibunda H. Panjaitan tercinta, adik-adikku Stephany Silalahi dan Joshua Silalahi, atas doa, dukungan, dan kasih sayang selama ini;
2. Keluarga besarku baik dari Ayahanda dan Ibunda, terima kasih untuk dukungan dan doanya selama ini;
3. Semua Guru-guruku sejak Taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang telah mendidik penulis;
4. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
5. Diri saya sendiri yang akhirnya bisa melewati dan menyelesaikan skripsi ini.

MOTO

I know that You can do everything, and that no purpose of Yours can be withheld from You¹.

(Job 42: 2)

“Je ne suis rien je le sais, mais je compose mon rien avec un petit morceau de tout.”²

“I am nothing, I know, but I made up my anything with a little bit of everything”.

¹ New King James Version (NKJV) Bible

² Quote of Victor Hugo (French poet, novelist and dramatist)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ruth Jenny K.S

NIM : 120910101031

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Reaksi Korea Selatan Terhadap Peningkatan Percobaan Senjata Nuklir Korea Utara” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 September 2018

Yang menyatakan,

Ruth Jenny K.S.

120910101031

SKRIPSI

**REAKSI KOREA SELATAN TERHADAP PENINGKATAN PERCOBAAN
SENJATA NUKLIR KOREA UTARA**

Oleh

RUTH JENNY K.S

120910101031

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Sunardi Purwaatmoko, MIS

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Agung Purwanto, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Strategi Korea Selatan dalam Menghentikan Ancaman Nuklir Korea Utara: Studi Kasus Penghentian Kerjasama di Wilayah Industri Kaesong” telah diuji dan disahkan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 15 Oktober 2018
Waktu : 11.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Bersama Universitas Jember

Tim Penguji:
Ketua

Agus Trihartono, S.Sos, MA., Ph.D.
NIP. 196908151995121001

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Sunardi Purwaatmoko, MIS
NIP. 196010151989031002

Drs. Agung Purwanto, M.Si.
NIP. 196810221993031002

Anggota I

Anggota II

Dr. Puji Wahono, M.Si.
NIP. 196002011987021001

Drs. M. Nur Hasan, M.Hum.
NIP 195904231987021001

Mengesahkan
Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si.
NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Reaksi Korea Selatan Terhadap Peningkatan Percobaan Senjata Nuklir Korea Utara; Ruth Jenny Kartini Silalahi, 120910101031: 2018: 87 halaman: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Konflik di Semenanjung Korea dan ketegangan yang menyertainya tidak dapat dipisahkan dari isu nuklir Korea Utara. Hal utama penyebab situasi keamanan di Semenanjung Korea kerap memanas adalah status hubungan Korea Utara dan Korea Selatan yang secara teknis masih dalam keadaan perang, perang Korea pada tahun 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai. Situasi demikian mengakibatkan tidak adanya norma yang disepakati untuk mengatur hubungan diantara kedua negara. Hal ini menyebabkan adanya rasa saling tidak percaya antara kedua negara tersebut. Pada 6 Januari 2016, Kim jong Un, memerintahkan otoritas militer Korea Utara untuk melakukan uji coba bom hidrogen, yang memiliki kekuatan ledakan yang lebih dahsyat dibandingkan bom nuklir lainnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran Korea Selatan terhadap keamanan negaranya serta dianggap dapat mengancam stabilitas keamanan kawasan Asia Timur. Ketegangan pun mewarnai hubungan keduanya. Ketegangan yang dipicu oleh aksi provokasi salah satu pihak terhadap pihak lainnya, ditambah program senjata nuklir yang dikembangkan oleh Korea Utara menimbulkan kekhawatiran masyarakat internasional dan menyebabkan situasi keamanan di Semenanjung Korea kerap memanas. Pada periode 2002-2016 Korea Utara semakin progresif dalam mengembangkan program senjata nuklirnya dan Korea Utara juga menolak mengikuti traktat ATT (*Arms Trade Treaty*) hingga non proliferasi nuklir. Tidak adanya inisiatif baik dari Korea Utara terkait percobaan senjata nuklirnya tersebut membuat Korea Selatan bereaksi keras. Korea Selatan dibawah pemerintahan Presiden Park Geun-Hye memutuskan untuk menutup satu-satunya kerjasama yang tersisa diantara kedua negara. Penutupan Kaesong menjadi pertimbangan yang rasional dan menjadi *bargain case* dari Korea Selatan yang

menganggap bahwa penutupan wilayah industri ini dapat menekan pihak Korea Utara yang selama ini menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan Asia Timur, khususnya bagi Korea Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika kerjasama antara Korea Selatan dan Korea Utara pada wilayah Industri Kaesong dan Untuk mengetahui reaksi dari Korea Selatan terhadap peningkatan uji coba senjata nuklir Korea Utara.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif-deskriptif. Penelitian ini menggunakan data-data sekunder yang berasal dari buku-buku, jurnal, media cetak maupun media online. Data-data tersebut dianalisis lalu kemudian dideskripsikan atau diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran secara utuh tentang permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah sikap yang diambil Korea Selatan melalui penerapan diplomasi koersif dimana negara tersebut memberikan sanksi ekonomi melalui penutupan wilayah industri Kaesong. Implikasi dari penutupan kawasan industri Kaesong memberikan dampak yang serius bagi Korea Utara, khususnya pada bidang sosial dan ekonomi. Korea Utara mengumpulkan pajak dan pendapatan dari aktivitas produksi di wilayah industri ini. Kerjasama ini diperkirakan telah menyumbang sekitar 20%-30% dari total ekspor Korea Utara. Dan menyumbangkan sebesar 22% dari total pemasukan nasional negara ini. Dengan ditutupnya kawasan ini maka Korea Utara akan kehilangan pendapatan nasional sebesar 22%. Selain itu terdapat 50.000 pekerja Korea Utara di kawasan industri ini akan otomatis kehilangan pekerjaannya. Selain dari yang telah disebutkan diatas, Korea Selatan juga menghentikan pasokan air bersih dan pemutusan listrik di daerah sekitar Kaesong dan beberapa wilayah penyangga lainnya. Hal ini dilakukan Korea Selatan untuk menekan pihak Korea Utara agar lebih kooperatif dalam menjalankan uji coba senjata nuklirnya dan menciptakan stabilitas keamanan di Semenanjung Korea.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Reaksi Korea Selatan Terhadap Peningkatan Percobaan Senjata Nuklir Korea Utara. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

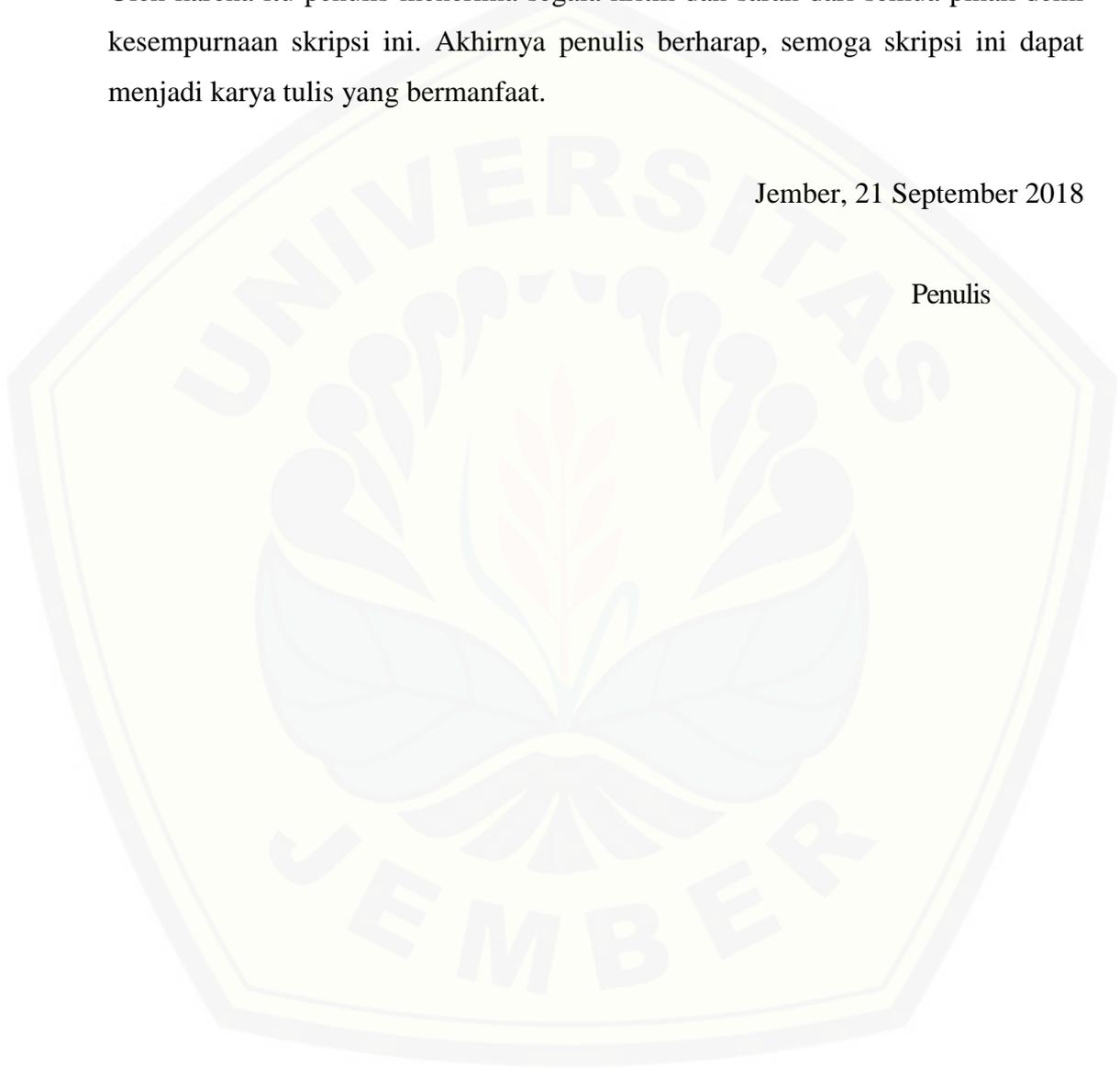
1. Bapak Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Jember.
2. Bapak Dr. Ardiyanto, M.Si., selaku Dekan FISIP Universitas Jember.
3. Bapak Dr. Sunardi Purwaatmoko, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Drs. Agung Purwanto, M.Si. selaku dosen pembimbing anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam membantu penulis menyusun skripsi selama ini;
4. Bapak Dr. Muhammad Iqbal S.Sos, M.Si. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa;
5. Bapak dan Ibu dosen di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa.
6. Bapak Sartam dan Bapak Panuluh, selaku operator jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Semoga tetap sehat dan selalu diberi kesabaran saat bertugas.
7. My Travel Buddy Hana Sarulina dan Novita Maranatha, buat semua bantuan yang pernah diberikan kepada penulis dan semua perjalanan-perjalanan menyenangkan selama ini.
8. Teman-teman saya Mega, Astrid, Lutfia, Vidyah, Moniq, Tika, Rickmond. Terimakasih buat semua kebaikan dan canda tawa yang selalu menghibur.
9. Teman-teman kosan, Yesi, Santi, Nafis dan Cyntia terimakasih buat semua kekonyolannya selama ini.
10. Teman-teman CG Pro 02, buat semua doa dan semangat yang diberikan.

11. Teman-teman jurusan Ilmu Hubungan Internasional 2012.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini tentu masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat menjadi karya tulis yang bermanfaat.

Jember, 21 September 2018

Penulis

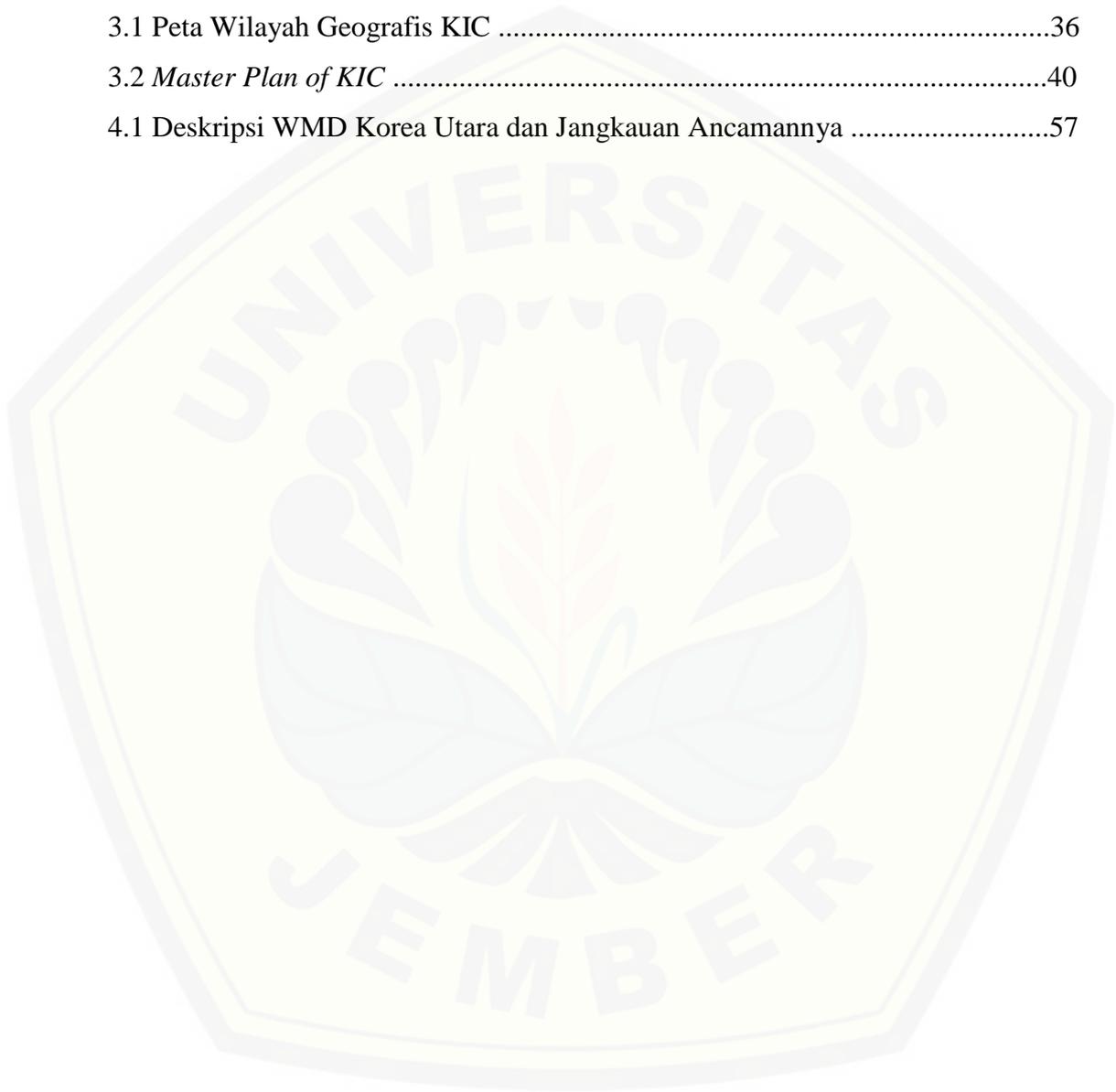


DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Perkembangan Kerjasama Non-Pemerintah Korea Selatan-Korea Utara	33
3.1 Master Plan of KIC (as of 2006).....	41
3.2 Perusahaan-Perusahaan di KIC.....	43
3.3 Jumlah Pekerja di KIC.....	43
3.4 Kekuatan Militer Korea Utara Tahun 2015.....	48
3.5 Frekuensi Insiden Korea Selatan-Korea Utara Tahun 1990-2015.....	51
4.1 Sejarah Perkembangan Nuklir Korea Utara.....	53
4.2 Uji Coba Senjata Nuklir Korea Utara Periode 2006-2016.....	55
4.3 Tindakan Provokatif Uji Coba Nuklir Korea Utara.....	55
4.4 WMD Korea Utara dan Potensi Ancamannya.....	58
4.5 Perkembangan GDP dan Kesenjangan antara pusat dan daerah di Korut.....	73

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Peta Wilayah Geografis Korea Utara	25
2.2 Peta Wilayah Geografis Korea Selatan	29
3.1 Peta Wilayah Geografis KIC	36
3.2 <i>Master Plan of KIC</i>	40
4.1 Deskripsi WMD Korea Utara dan Jangkauan Ancamannya	57



DAFTAR SINGKATAN

ICBM	: <i>Intercontinental Balistic Missile</i>
KIC	: <i>Kaesong Industrial Complex</i>
MBT	: <i>Main Battle Tank</i>
ATT	: <i>Arms Trade Treaty</i>
DMZ	: <i>The Demilitarized Zone</i>
OECD	: <i>Organization for Economic Cooperation and Development</i>
APEC	: <i>Asia-Pacific Economic Cooperation</i>
KTT	: <i>Konferensi Tingkat Tinggi</i>
APPC	: <i>Asia-Pacific Peace Committee</i>
WMD	: <i>Weapons of Mass Destruction</i>
MRBM	: <i>Medium Range Balistic Missile</i>
IRBM	: <i>Intermediate Range Balistic Missile</i>
PBB	: <i>Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>
IAEA	: <i>International Atomic Energy Agency</i>
OMM	: <i>Ocean Maritime Management Company</i>
NADA	: <i>National Aerospace Development Administration</i>
KOMID	: <i>Korea Mining Development Trading Corporation</i>
NPT	: <i>Nuclear Non-Proliferation</i>
KCNA	: <i>The Korean Central News Agency</i>
GDP	: <i>Gross Domestic Product.</i>

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN	ii
MOTO	iii
PERNYATAAN	iv
PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2. Ruang Lingkup Pembahasan.....	6
1.3. Rumusan Masalah.....	6
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Kerangka Teori/Konsep	7
1.6. Argumen Utama.....	14
1.7. Metodologi Penelitian.....	14
1.7.1. Jenis Penelitian.....	15
1.7.2. Teknik Pengumpulan Data.....	15
1.7.3. Teknik Analisis Data.....	15
1.8. Sistematika Penulisan	16
BAB 2. GAMBARAN UMUM DAN KERJASAMA KOREA SELATAN-KOREA UTARA	17
2.1. Momentum Terpecahnya Korea Selatan dan Korea Utara	17
2.2.1. Korea Dibawah Kolonisasi Jepang.....	18
2.1.2. Pemisahan Politik Korea Selatan- Korea Utara	22
2.2. Profil Korea Utara dan Korea Selatan.....	24

2.2.1 Profil Korea Utara	24
2.2.2. Profil Korea Selatan	27
2.3. Kerjasama Korea Selatan dan Korea Utara.....	30
BAB 3. DINAMIKA KERJASAMA KOREA SELATAN DAN KOREA UTARA DI KAWASAN INDUSTRI KAESONG.....	34
3.1 Deskripsi Kawasan Industri Kaesong	34
3.2 Kerjasama Korea Selatan - Korea Utara di Kawasan Industri Kaesong	37
3.3. Ketegangan Hubungan Antara Korea Selatan dan Korea Utara	44
BAB 4. TINDAKAN KOREA SELATAN SEBAGAI RESPON ATAS PROVOKASI UJI COBA SENJATA NUKLIR KOREA UTARA	52
4.1. Pengembangan Program Nuklir Korea Utara	53
4.2. Reaksi Masyarakat Internasional Terhadap Pengembangan Nuklir Korea Utara..	59
4.3. Reaksi Korea Selatan Atas Provokasi Uji Coba Senjata Nuklir Korea Utara.....	68
4.3.1. Penerapan Sanksi Ekonomi Sebagai Reaksi Korea Selatan Terhadap Uji Coba Senjata Nuklir Korut	69
4.3.2. Pemutusan Hubungan Kerjasama di wilayah Industri Kaesong Sebagai Reaksi Korsel Atas Uji Coba Senjata Nuklir Korut.....	72
BAB 5. KESIMPULAN	79
DAFTAR PUSTAKA	82

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan politik-keamanan internasional tidak dapat dilepaskan dari konflik antarnegara. Salah satunya adalah konflik antara Korea Selatan dan Korea Utara yang pertama kali pecah sejak 25 Juni 1950. Konflik ini ternyata bukan hanya melibatkan kedua negara tersebut, namun juga melibatkan intervensi internasional, dimana Korea Selatan memperoleh dukungan dari negara-negara Barat, diantaranya Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Belgia, Perancis, Kanada, Australia dan beberapa negara lainnya, sedangkan Korea Utara memperoleh dukungan dari Republik Rakyat Tiongkok dan Uni Soviet (Edward, 2010:22).

Konflik Korea Selatan dan Korea Utara pada tahun 1950 menjadi persoalan yang serius ketika terjadi pengerahan kekuatan militer dalam jumlah besar, diantaranya personel angkatan darat, laut dan udara yang mencapai 231 ribu personel, serta pengerahan alutsista darat, diantaranya MBT (*main battle tank*) jenis T34 dan R85 puluhan unit, hingga alutsista udara diantaranya Yak AT-6 dan pesawat mata-mata. Konflik ini kemudian menjadi perhatian internasional dan dikhawatirkan akan menimbulkan jatuhnya korban dari masyarakat sipil, sehingga mendorong Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan Resolusi Nomor 82, 83, 84 dan 85 Tahun 1950 (United Nations, 1950).

Pada 27 Juli 1953, Korea Selatan dan Korea Utara berhasil menyepakati perjanjian gencatan senjata, meskipun demikian bentuk penyelesaian secara permanen belum terwujud sehingga sampai dengan saat ini (tahun 2017) konflik kedua negara masih terus berlangsung (*ongoing conflict*). Sejak tahun 1953 hingga 2016 atau sekitar 63 tahun hubungan kedua negara antara Korea Selatan dan Korea Utara masih tetap menjalankan beberapa bentuk kerjasama, diantaranya :

- a. Hubungan sosial, memasuki dekade 2000-an, intensitas hubungan masyarakat kedua negara terus meningkat, bahkan menurut survei yang

dijalankan BBC sekitar 78% masyarakat Korea Selatan dan Korea Utara sepakat untuk menganggap wilayahnya sebagai tempat tinggal bersama.

- b. Hubungan kebudayaan, bahwa semakin banyak kalangan masyarakat kelas menengah atas ataupun kaum birokrat yang menggunakan produk dan budaya pop Korea Selatan, seperti halnya pengembangan produk-produk Hyundai, KIA dan LG bahkan kedua negara juga menyepakati beberapa agenda diantaranya *Spring is Come* hingga kesepakatan untuk menyambut olimpiade musim dingin (Edward, 2010:61).

Jadi meskipun hubungan kedua negara cenderung memburuk pasca dekade 1990-an, namun berbagai upaya untuk mendekatkan diri atas dua negara sebangsa ini terus dijalankan. Selain yang sudah disebutkan diatas, Korea Selatan dan Korea Utara juga menjalankan sebuah kerjasama ekonomi melalui kawasan industri Kaesong yang merupakan wilayah administratif khusus yang terletak di sepuluh kilometer sebelah utara zona demiliterisasi Korea (BBC, 2016). Kaesong merupakan zona Industri yang terletak di wilayah Korea Utara. Wilayah ini berada di sebelah utara zona demiliterisasi yang memisahkan kedua negara. Kawasan industri Kaesong atau *Kaesong Industrial Complex* (KIC) merupakan sebuah kawasan industri yang mulai dioperasikan sejak Desember 2004 sebagai bagian dari reformasi kebijakan ekonomi Korea Utara oleh Kim Jong-il dan kebijakan “*Sunshine Policy*” oleh mantan Presiden Korea Selatan Kim Dae Jung (Sang-Hun, 2016).

Pembangunan Industri Korea Selatan di wilayah Kaesong ini berpengaruh positif bagi kedua negara. Hal tersebut dapat dilihat dari pemerintah Korea Utara yang mengumpulkan pajak dan pendapatan dari aktivitas produksi di kawasan industri ini. Kawasan industri ini mempekerjakan lebih dari 50.000 penduduk Korea Utara dan menjadi salah satu sumber pendapatan bagi negara ini. Sejak dimulainya produksi pada tahun 2004, Kaesong telah memberikan sumbangan dana sekitar Rp 7 triliun untuk Korea Utara. Sedangkan keuntungan bagi Korea Selatan, mereka mendapatkan tenaga kerja dengan tarif yang rendah dari Korea Utara. Dengan menggabungkan keunggulan komparatif dari kedua negara diharapkan dapat membawa hawa sejuk bagi hubungan kedua negara dan memberikan harapan

bagi kedua negara untuk tetap menjalin kerjasama yang baik meskipun Kaesong tidak luput dari isu dan permasalahan, namun Kaesong tetap berjalan dengan lancar.

Namun segala tindakan provokasi percobaan senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara membuat Korea Selatan merasa keamanannya terancam. Pada 6 Januari 2016, Korea Utara melakukan uji coba persenjataan nuklir yang ke-empat mereka. Kim Jong-Un memerintahkan otoritas militer Korea Utara untuk melakukan uji coba bom hidrogen, yang memiliki kekuatan ledakan yang lebih dahsyat dibandingkan bom nuklir lainnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran Korea Selatan terhadap keamanan negaranya serta dianggap dapat mengancam stabilitas keamanan Kawasan Asia Timur. Pada periode 2002-2016 Korea Utara semakin progresif dalam mengembangkan senjata nuklir, di berbagai kelas, baik jarak pendek, menengah hingga ICBM (*Intercontinental Ballistic Missile*). Di lain pihak, Korea Utara juga menolak mengikuti traktat ATT (*Arms Trade Treaty*) hingga non-proliferasi nuklir. Berbagai bentuk dialog damai atau rundingan coba dilakukan oleh Korea Selatan maupun negara-negara lain agar Korea Utara dapat menghentikan segala percobaan senjata nuklirnya. Namun, semua dialog damai yang dilakukan belum menghasilkan keputusan permanen jangka panjang, hal ini dapat dilihat dari Korea Utara yang masih tetap melanjutkan segala tindakan uji coba senjata nuklirnya.

Situasi di Semenanjung Korea di atas memperlihatkan bahwa keamanan di wilayah ini belum kondusif. Dunia internasional masih menyaksikan ketegangan kerap terjadi di wilayah ini, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meredakan ketegangan dan mencari solusi damai atas konflik di Semenanjung Korea, baik dalam kerangka solusi damai antar-Korea (Korea Selatan dan Korea Utara melalui program reunifikasi) maupun terhadap isu nuklir Korea Utara (melalui perundingan enam pihak/ *six party talks*) atas konflik. Namun upaya damai tersebut selalu kandas ditengah jalan, karena ketidakpercayaan masih kuat menghinggapi para pihak yang saling berlawanan, yaitu Korea Selatan dan Korea Utara. Tidak adanya inisiatif baik dari Korea Utara terkait uji coba senjata nuklirnya tersebut membuat Korea Selatan bereaksi Keras. Pada tanggal 10 Februari 2016 Korea Selatan memutuskan untuk menutup kawasan industri Kaesong. Keputusan

Korea Selatan untuk menutup KIC mengejutkan banyak pihak. Pengecualian pada tahun 2013, kerjasama pada kawasan industri ini belum pernah mendapatkan reaksi politik yang keras dari pihak Korea Selatan sebelumnya. Peningkatan ketegangan antara kedua negara sejak awal tahun 2008 hingga tahun 2015 belum pernah membuat pihak Korea Selatan memutuskan untuk menutup kawasan industri ini (Ryall, 2017).

Penutupan Kaesong menjadi kasus yang menarik karena sepanjang sejarah konflik negara ini belum pernah sekalipun kawasan industri ini mengalami penutupan dari pihak Korea Selatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Jung En-Woo yang merupakan analis politik internasional dari *Kyung Hee University* bahwa:

“...Korea Utara di bawah Kim (Kim Jong-Un) cenderung semakin impresif, sedangkan Korea Selatan berupaya mengakomodasi melalui pendekatan-pendekatan kebangsaan. Kasus penutupan Kaesong ternyata menunjukkan anomali (hal yang diluar kebiasaan), sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah Park Gyeun He memiliki kepentingan yang sangat kuat.”(Jung En-Wo,2017:21)

Sampai dengan tahun 2010 hubungan Korea Selatan dan Korea Utara masih belum menunjukkan pencapaian yang harmonis. Ini juga berpengaruh pada rekonsiliasi dan reunifikasi yang masih jauh dari harapan. Di tahun 2010 friksi antara kedua negara terjadi, Korea Selatan menuduh Korea Utara menenggelamkan satu kapal milik mereka dan memberlakukan sejumlah sanksi berat, namun wilayah industri ini masih tetap dibuka. Sejak pertama kali dibuka, ketegangan antar kedua negara belum pernah membuat kawasan ini terancam ditutup atau mendapat pengaruh politik apapun selain pada tahun 2013 (Hyeyoon, 2017). Pada tahun 2013 hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara dihadapkan pada meningkatnya ketegangan lintas perbatasan. Pada awalnya Korea Utara yang menutup wilayah industri ini selama lima bulan dengan cara menarik para pekerja yang berjumlah lebih dari 50 ribu orang tersebut. Hal ini sebagai bentuk protes atas latihan militer gabungan yang dilakukan oleh Korea selatan dengan sekutu terdekatnya yaitu Amerika Serikat. Tetapi setelah 5 bulan berlau, kawasan industri ini kembali beroperasi. Pada tanggal 10 Februari 2016, selain dari pengumuman yang

menyebutkan akan menutup kawasan ini, Korea Selatan juga memotong pasokan listrik dan air ke kompleks industri ini.

Penutupan Kaesong memang menjadi pertimbangan yang rasional dan menjadi *bargain case* dari Korea Selatan yang menganggap bahwa penutupan wilayah industri ini dapat menekan pihak Korea Utara yang selama ini menjadi ancaman bagi stabilitas Asia Timur, khususnya bagi Korea Selatan. Memang Korea Selatan juga mengalami kerugian atas penutupan Kaesong, namun kerugian terparah dan terbesar akan dihadapi oleh Korea Utara. Hal ini sesuai dengan pernyataan Menteri Perdagangan, Industri dan Energi Korea Selatan Park Un-Gyu bahwa :

“...We suffered losses, but industrial capacity that we have is still considerable, whereas North Korea only has a major industrial facility in Kaesong as trade and industry. This policy is very difficult, but we implement to maintain the stability of the security”(Gyu,2017:38)

(Kami (Korea Selatan) mengalami kerugian, namun kapasitas industri yang kami miliki masih cukup besar, sedangkan Korea Utara hanya memiliki Kaesong sebagai fasilitas industri utama perdagangan dan industri. Kebijakan ini sangat sulit, namun kami tetap menerapkannya untuk menjaga stabilitas keamanan).

Penutupan Kaesong bukan bagian dari euforia politik, berkaitan dengan dinamika hubungan Korea Selatan dan Korea Utara yang cenderung memanas, namun hal ini didasari oleh kepentingan yang sangat mendasar. Dalam menyikapi persoalan ini, penulis berasumsi bahwa kasus penutupan Kaesong berhubungan dengan persoalan yang lebih luas yang berhubungan dengan dinamika yang terjadi diantara kedua negara. Selain itu, kasus ini juga berkaitan dengan fakta bahwa resolusi dan rekonsiliasi konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan masih belum tercapai secara efektif.

Bagi penulis Penutupan Kaesong menunjukkan adanya fenomena bahwa Korea Selatan berupaya mewujudkan pencapaian kepentingan nasional yang sangat mendasar. Itulah sebabnya kasus penutupan kaesong ini sangat mengejutkan berbagai pihak, khususnya negara-negara di wilayah Asia Timur. Penutupan Kaesong merupakan kebijakan akhir dari pemerintah Korea Selatan di bawah kepemimpinan Park Geun-hye untuk mengatasi masalah klasik dan kontemporer yang dihadapi oleh kedua negara yaitu nuklir. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk

membahas lebih lanjut tentang Reaksi Korea Selatan Terhadap Peningkatan Uji Coba senjata nuklir Korea Utara.

1.2. Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis akan fokus pada hubungan perekonomian dan manufaktur/industri antara Korea Utara dan Korea Selatan, khususnya berkaitan dengan operasionalisasi Kaesong yang berhasil membawa berbagai keuntungan bagi Korea Utara dan Korea Selatan pada tahun 2002. Kemudian fokus selanjutnya adalah momentum penutupan kawasan industri Kaesong pada tahun 2016 yang menjadi sebuah kebijakan formal dari pemerintah Korea Selatan.

Kasus penutupan kawasan industri Kaesong ternyata dilatarbelakangi oleh berkembangnya dinamika ekonomi politik dan keamanan pada masa itu. Dengan demikian kebijakan luar negeri Korea Selatan ini menunjukkan adanya kepentingan nasional yang sangat kuat bagi pihak Korea Selatan, khususnya pada bidang ekonomi, politik dan militer.

1.3. Rumusan Masalah

Melalui uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik pokok permasalahan, yaitu :

“Bagaimana Reaksi Korea Selatan Terhadap Peningkatan Uji Coba Senjata Nuklir Korea Utara?”

1.4. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika kerjasama antara Korea Utara dan Korea Selatan di Wilayah Industri Kaesong.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Reaksi dari Korea Selatan terhadap peningkatan uji coba senjata nuklir Korea Utara.

1.5. Kerangka Teori/Konsep

Dalam menjawab rumusan masalah tentang Reaksi Korea Selatan Terhadap Peningkatan Percobaan Senjata Nuklir Korea Utara maka penulis menggunakan pendekatan yang relevan yaitu Teori politik luar negeri dan teori diplomasi koersif. Pendekatan tersebut dipilih karena mampu menjelaskan tentang bagaimana reaksi yang diambil Korea Selatan terhadap peningkatan percobaan senjata nuklir Korea Utara pada tahun 2016.

Setiap negara memiliki arah politik luar negeri yang berbeda. Politik luar negeri adalah arah kebijakan yang diterapkan oleh sebuah negara dalam mengatur hubungannya dengan Negara lain dengan tujuan agar tercapainya kepentingan nasional negara tersebut dalam lingkup dunia internasional. Politik luar negeri suatu negara merupakan bagian dari strategi politik nasional. Setiap Negara memiliki strategi politik luar negeri yang berbeda-beda. Dalam pengklasifikasian tujuan politik luar negeri akan digunakan tiga kriteria:

- Tujuan yang ingin dicapai oleh si pembuat kebijakan dan sumber daya yang dimiliki oleh Negara tersebut untuk mencapai tujuan
- Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan
- Jenis tuntutan yang dibebankan kepada Negara lain agar sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai. (Holsti, 1992: 175)

Sebuah negara memerlukan implementasi kebijakan untuk dapat mendukung pencapaian politik luar negerinya ataupun sebagai pendekatan dalam menyelesaikan beberapa persoalan yang berkaitan dengan hubungan luar negeri. Istilah kebijakan sering digunakan dan dipertukarkan maknanya dengan tujuan, program, keputusan hukum dan proposal. Padahal sesungguhnya istilah kebijakan itu memiliki definisi dan pengertian tersendiri yang berbeda. Pada definisi yang berbeda menyatakan bahwa menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt, dalam buku *Labyrinths of Democracy*, kebijakan yaitu :

“...The policy is a decision remains characterized by consistency and repetition of the behaviour of those who make policy itself and from those who comply with the decision” (Kebijakan adalah sebuah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari

mereka yang membuat kebijakan itu sendiri dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut) (Athlaus, 2007:2).

Kebijakan adalah serangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi yang dimaksudkan sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran. Istilah kebijakan secara garis besar dapat diterapkan pemerintahan, organisasi, kelompok swasta ataupun individu (Marbun, 2005:265).

Dengan ditetapkannya suatu kebijakan oleh pemerintah, menunjukkan adanya suatu kepentingan negara yang ingin dicapai. Pada dasarnya kebijakan suatu negara adalah untuk mencapai, mempertahankan dan melindungi kepentingan nasional negara tersebut. Pada umumnya kepentingan nasional dibedakan menjadi dua yaitu kepentingan dalam negeri dan kepentingan luar negeri. Untuk mewujudkan kepentingan tersebut perlu diambil sebuah tindakan yang disebut kebijakan atau *policy*. Kebijakan dalam negeri menekankan pada hubungan dan kepentingan pemerintah dengan rakyatnya. Sedangkan kebijakan luar negeri menekankan pada hubungan suatu negara dengan negara lain atau actor internasional lain (Holsti, 1992: 300).

Tindakan pada dasarnya merupakan bentuk komunikasi yang diharapkan mampu mengubah atau mempertahankan perilaku negara dan mengakibatkan pemerintah terikat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh negara. Dalam politik internasional, tindakan dan isyarat digunakan dalam berbagai bentuk yang berbeda. Janji memberikan bantuan luar negeri merupakan bentuk dari suatu tindakan politik luar negeri, seperti juga propaganda, pameran kekuatan militer, pemakaian hak veto pada dewan keamanan PBB, *walk out* dalam konferensi, memberikan peringatan melalui nota diplomatik, mengadakan boikot terhadap barang-barang negara lain, atau menyatakan perang. Pendekatan diplomasi sebagai teknik untuk meluaskan pengaruh, merupakan bentuk ancaman yang paling lemah, sedangkan tekanan ekonomi, subversi, intervensi dan berbagai bentuk perang merupakan tingkat ancaman dan sanksi yang paling besar (Holsti, 1992, 200).

Dalam politik luar negeri terdapat beberapa instrumen, salah satunya instrumen ekonomi. Karena bangsa moderen memiliki sifat saling ketergantungan

ekonomi dan teknologi, maka mereka mengadakan sebuah hubungan untuk memperoleh sumber daya dan komoditi yang memungkinkan mereka membangun dan mempertahankan kelangsungan ekonominya. Kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh sumber daya dalam negeri menciptakan ketergantungan kepada negara lain. Seperti telah diungkapkan, tingkat kebutuhan merupakan salah satu unsur variabel penguji keberhasilan untuk mempengaruhi politik internasional. Karena sumber daya ekonomi bersifat langka, tetapi diperlukan sekali untuk memenuhi nilai dan aspirasi nasional, mengakibatkan ketergantungan dalam dunia modern yang bersifat ekonomi pula (Holsti, 1992:300).

Dalam pencapaian tujuan dalam instrumen ekonomi ini terdapat teknik imbalan dan sanksi ekonomi. Pada saat imbalan ekonomi diajukan, atau ancaman sanksi ekonomi dilakukan, minimal dua kondisi harus dipenuhi agar pengaruh berlangsung efektif, *pertama*, negara yang menjadi sasaran pengaruh harus memandang bahwa mereka benar-benar membutuhkan imbalan atau mencegah dilakukannya sanksi. *Kedua*, negara yang menjadi sasaran pengaruh tidak memiliki pasar atau sumber persediaan bahan (Holsti, 1992: 303).

Kemudian pendekatan selanjutnya adalah diplomasi koersif. Pada dasarnya diplomasi menjadi sebuah pendekatan atau konsep yang relevan dan memiliki dependensi dengan realisme. Ini disebabkan diplomasi menjadi upaya dalam mewujudkan kepentingan nasional melalui kebijakan luar negeri yang berhubungan dengan ide-ide dan gagasan daripada pemimpin dan para stakeholder lainnya, sekaligus menjadi transformasi sosial-politik dari partai politik, kelompok masyarakat, pelaku usaha (kelompok kapitalis) dan lain-lainnya.

Realisme menjadi perpektif yang berperan penting dalam menjembatani berbagai fenomena politik internasional di era globalisasi. Dalam realisme terdapat fokus proposisi, dimana sistem politik internasional merupakan pola anarki sehingga perlu upaya-upaya sistematis ataupun reaktif untuk memperjuangkan posisinya dalam konstelasi politik internasional. Keneth Neill menyatakan bahwa :

“...dalam negara anarkhi akan muncul entitas-entitas yang berupaya menunjukkan eksistensinya dalam politik internasional. Kemudian akan terlihat negara-negara yang dapat mendominasi dan juga akan muncul negara-negara yang akan mengikutinya dalam afiliasi secara

formal ataupun karena kedekatan ideologi. Dari semua upaya ini diplomasi menjadi bagian yang terintegrasi untuk mewujudkan agenda tersebut yang nantinya akan menciptakan apa yang disebut dengan 'balance of power'." (Kirieger and Neill,1998:139).

Dalam perpektif realisme diplomasi menjadi upaya untuk mengelola, merencanakan, mencapai, mengembangkan pencapaian kepentingana atas interaksinya dengan aktor internasional lainnya, meliputi diplomasi bilateral, multilateral ataupun melalui diplomasi dalam kerangka organisasi internasional. Pada prinsipnya teknik diplomasi adalah sebuah cara atau upaya yang dilakukan oleh seorang diplomat dalam melakukan sebuah perundingan, hal tersebut bisa berupa tindakan tawar menawar, bujukan (persuasif), memberi ancaman ataupun dengan melakukan kesepakatan/ perjanjian. Maka dapat dikatakan politik suatu Negara bertujuan untuk dapat mencapai dan melindungi kepentingan nasional Negara tersebut. Diplomasi memiliki unsur pokok yaitu negosiasi. Dalam mewujudkan tercapainya kepentingan suatu Negara maka perlu dilakukan sebuah negosiasi, yang kemudian diharapkan tindakan-tindakan diplomatik yang diambil dalam mencapai kepentingan nasional tersebut dapat dilakukan secara damai. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari diplomasi adalah pemeliharaan perdamaian tanpa merusak kepentingan nasional. Dengan kata lain, diplomasi adalah sebuah cara atau upaya yang dilakukan oleh seorang diplomat dalam mencapai kepentingan nasional negaranya dengan cara damai (Beridge, 2015:17).

Diplomasi sering disebut sebagai garis pertama dalam sebuah pertahanan. Hal ini tentu terkait dengan masalah keamanan yang tidak jarang dapat menimbulkan sebuah konflik, yang kemudian diharapkan bahwa konflik tersebut dapat diolah dengan cara damai melalui upaya diplomasi. Dengan dilakukannya sebuah diplomasi, makan akan terjadi perundingan sehingga hal-hal yang dapat memicu konflik dapat dicegah. Dependensi antara negosiasi dan keamanan nasional menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan nasional sebuah negara bukan hanya datang dari dalam saja namun para aktor-aktor negara tersebut juga harus memperhatikan ancaman-ancaman yang datang dari luar. Oleh sebab itu, dalam

prakteknya sebuah Negara perlu melakukan banyak pekerjaan dalam upaya memberikan rasa aman bagi seluruh warga negaranya (Barston, 1998:48).

Dalam perspektif realis terdapat aspek pencapaian diplomasi untuk mewujudkan pencapaian jangka pendek (*reactif interest*) dan pencapaian jangka panjang (*continuing interest*). Pada kedua model pencapaian diplomasi ini negara akan merencanakan dan memperhatikan berbagai kekuatan sosial, ekonomi, militer dan politik yang ada. Hal ini berkaitan dengan empat faktor penting, yaitu :

- a. Implementasi diplomasi seringkali digunakan dalam kerangka isu yang berseberangan.
- b. Implementasi diplomasi dengan memaafkan isu-isu yang berhubungan dengan kebutuhan yang bersifat mendasar, baik bagi elit, kelas menengah ataupun masyarakat secara luas.
- c. Dalam spektrum yang lebih luas implementasi diplomasi sebagai wujud rekonsiliasi konflik melibatkan pihak-pihak/negara yang memiliki kepentingan dalam jumlah besar.
- d. Figur *nation level* ataupun pembuatan kebijakan sangat menentukan orientasi dan arah diplomasi untuk mengoptimalkan prioritas dan pencapaian (Kirieger and Neill, 1998:139).

Sumaryo Suryokusumo menyatakan bahwa diplomasi adalah kegiatan politik dan merupakan bagian dari kegiatan internasional yang saling berpengaruh dan kompleks, dengan melibatkan pemerintah dan organisasi internasional untuk mencapai tujuan-tujuannya. Harold Nicholson menyatakan proposisinya bahwa diplomasi dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pertama, diplomasi dalam konteks *warrior theory* dimana yang digambarkan dalam konteks ini adalah politik kekuatan, sangat memperhatikan kehormatan atau wibawa nasional dan status negara untuk mencapai kemenangan. Dan kedua, *shopkeeper (mercantile)* konteks ini bertolak belakang dengan yang pertama, dalam konteks ini lebih mengutamakan rundingan atau negosiasi yang bersifat menguntungkan secara politis dan memuaskan dengan cara konsiliasi dan kompromi diantara pihak-pihak yang bersengketa (Suryokusumo, 2004:39).

Pada bidang keamanan, diplomasi suatu negara atas negara lain menunjukkan upaya tarik ulur untuk menghasilkan sebuah pencapaian yang bersifat jangka panjang (permanen). Terdapat kelompok negara dengan karakter militer yang kuat, namun memiliki konteks ekonomi yang lemah, atau dapat juga sebuah negara yang memiliki perekonomian yang lemah, namun memiliki kondisi sosial yang prima dan masih banyak lagi. Apapun kondisinya sebuah negara harus dapat memprioritaskan pencapaian dengan mempertimbangan berbagai kekuatan potensi politik luar negeri yang ada.

Diplomasi merupakan *main strategy* dalam mewujudkan pencapaian kepentingan nasional. Meskipun pada dasarnya diplomasi mekankan pada interaksi entitas suatu negara terhadap entitas internasional yang dapat berupa negara, organisasi internasional hingga kelompok masyarakat, namun diplomasi dapat dibagi dalam beberapa metode/model, diantaranya *market diplomacy*, *dollar diplomacy*, *secret diplomacy*, *public diplomacy*, *conference diplomacy* dan beberapa metode lainnya, termasuk *coercive diplomacy*.

Diplomasi koersif secara sederhana merupakan metode diplomasi dengan mengedepankan fungsi penarapan sanksi. Sedangkan secara sistematis, diplomasi koersif merupakan metode diplomasi yang bertujuan untuk merubah sikap, kebijakan atau keputusan suatu negara dengan ancaman, sanksi, pemutusan, penundaan, pengurangan hingga pembatalasan kerjasama luar negeri (Emilia, 2013:71). Barry Buzan menyatakan bahwa :

“...diplomasi koersif merupakan tindakan tarik-ulur dan penyesuaian-penyesuaian atas penerapan sanksi teringan hingga terberat yang dikenal dengan ultimatum dengan harapan agar pihak lawan dapat mengikuti proposisi/ketemtuan yang telah direncanakan sebelumnya. Keberhasilan atau kegagalan sangat ditentukan oleh berbagai faktor meliputi kapabilitas kekuatan subyek dan lawan, isu yang sedang berkembang, kronisitas masalah dan lain-lainnya.”
(Barston,1998:48)

Jadi, diplomasi koersif dikenal dengan diplomasi penerapan sanksi. Pada awalnya adalah upaya untuk menekankan pada penerapan sanksi bagi negara yang secara meyakinkan telah melanggar hukum internasional, namun dalam berkembangnya penerapan koersif juga dijalankan suatu negara terhadap negara

lain yang dianggap dapat membahayakan kelangsungan keamanan dalam negeri ataupun global.

Kemudian Alexander George menyatakan bahwa diplomasi koersif merupakan metode diplomasi untuk mempengaruhi kehendak musuh ataupun struktur insentif. Selengkapnya George menyatakan bahwa :

“...diplomasi koersif dapat dijelaskan sebagai strategi politik diplomatik yang bertujuan untuk mempengaruhi kehendak musuh. Ini adalah strategi yang menggabungkan ancaman-ancaman kekuatan, dan jika diperlukan, menggunakan kekuatan yang terbatas dan selektif secara bertahap dan terkendali, dalam strategi tawar-menawar yang positif. Tujuannya untuk mendorong lawan agar memenuhi tuntutan dari Negara yang menerapkan diplomasi ini atau untuk bernegosiasi dengan melakukan kompromi yang paling menguntungkan agar dapat mencegah terjadinya konflik militer yang tidak diinginkan.” (George and Simon, 1994:39)

Proposisi George di atas dapat diartikan bahwa diplomasi koersif dijalankan untuk mempengaruhi kehendak musuh. Implementasi diplomasi koersif dijalankan dengan menggabungkan ataupun mengharmonisasikan kekuatan ekonomi, militer secara selektif, terbatas dan kemudian dilanjutkan dengan peningkatan-peningkatan yang terkontrol. Dalam metode diplomasi ini terdapat instrmen penting yaitu adanya negosiasi ataupun bujukan sambil mengelola krisis agar tidak terjadi krisis militer ataupun konflik secara terbuka.

Implementasi diplomasi koersif dijalankan melalui beberapa tahapan, masing-masing yaitu :

- a. *Ultimatum* adalah wujud sikap terakhir dari suatu negara terhadap negara lawan pada level *political issue*.
- b. *Tacit ultimatum* wujud sikap terakhir dari suatu negara terhadap negara lawan pada nation level berupa kebijakan yang dilegitimasi oleh pemerintah, kelompok kepentingan dan instrumen pembuat kebijakan suatu negara.
- c. *Try and See* (mencoba dan melihat) untuk melihat respon dari lawan (feed back) untuk kemudian dicapai keputusan akhir ataupun evaluasi untuk diterapkan kebijakan lanjutan.

- d. *Gradual turning of the screw* adalah memindahkan persoalan yang berkembang secara permanen dalam kerangka rekonsiliasi konflik dalam konsep yang lebih permanen (George and Simon, 1994:39).

1.6. Argumen Utama

Melalui uraian kerangka pemikiran di atas maka dapat diketahui bahwa konflik di Semenanjung Korea dan ketegangan yang menyertainya tidak dapat dipisahkan dari isu nuklir Korea Utara. Pada tanggal 6 Januari 2016, Korea Utara melaksanakan uji coba senjata nuklirnya yang ke-empat. Hal ini membuat banyak negara mengecam tindakan dari Korut tersebut termasuk negara tetangganya Korea Selatan. Dengan adanya segala provokasi uji coba senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara membuat Korea Selatan akhirnya mengambil keputusan yang tegas. Korea Selatan memutuskan untuk memberikan sanksi ekonomi dengan menutup satu-satunya kerjasama yang tersisa diantara kedua negara. Dengan dilakukannya penghentian kerjasama pada wilayah ini menyebabkan dampak yang serius bagi Korea Utara. Sanksi ini dilakukan Korea Selatan agar kedua negara dapat duduk bersama melalui dialog damai dalam memecahkan masalah yang terjadi di Semenanjung Korea dan agar Korea Utara dapat lebih kooperatif dalam menjalankan pengembangan persenjataan nuklir yang mereka miliki supaya terciptanya stabilitas keamanan di Kawasan Asia Timur khususnya di Semenanjung Korea.

1.7. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu serta membantu penulis dalam menganalisa dan menjawab pertanyaan (Sugiyono,2011:2). Metode penelitian merupakan suatu langkah yang sistematis dalam sebuah penelitian dan merupakan faktor penting karena berhubungan dengan bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan. Dalam proses penelitian, perlu adanya langkah-langkah yang

sistematis untuk menentukan jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian yang kemudian diolah sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

1.7.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Cassel and Symon, 1994:3-4). Dalam penelitian ini penulis berusaha menjelaskan Strategi Korea Selatan untuk menghentikan program nuklir Korea Utara melalui pemutusan hubungan kerjasama industri di wilayah Kaesong.

1.7.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan pengumpulan data sekunder. Peneliti menggunakan jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan seperti melalui media atau dokumen tertulis. Sehingga teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi pustaka. Sumber data diambil dari buku-buku, artikel-artikel, arsip publikasi pemerintah dan jurnal-jurnal baik yang didapat melalui kepustakaan maupun media internet (Yin, 1996:4).

1.7.3. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data dan penyajian data dengan mengelompokkannya dalam suatu bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif, karena setiap data yang dipergunakan berasal dari

sumber literatur, maka data-data yang diperoleh berwujud kata-kata, daripada rangkaian angka. Meskipun ada beberapa data yang melampirkan gambar grafik dan tabel namun data tersebut akan dijelaskan secara kualitatif. Oleh karena itu, metode analisis data yang tepat untuk digunakan adalah analisis kualitatif. Teknik analisis data kualitatif ini dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sehingga kemudian dari data-data tersebut akan diperoleh hasil analisis berupa penjelasan tentang sebuah pembuktian dalam menjawab rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya.

1.8. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi dalam lima bab dengan masing-masing perincian sebagai berikut :

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori/konsep, argumen utama, metode penelitian, serta sistematika penulisan

Bab II membahas tentang hubungan Korea Utara dan Korea Selatan yang meliputi faktor sejarah, perkembangan hingga berbagai pencapaian pada kedua negara, khususnya pada bidang perekonomian dan industri.

Bab III membahas tentang deskripsi kawasan industri Kaesong, kerjasama kedua negara di kawasan industri Kaesong, hingga ketegangan hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara.

Bab IV merupakan bab analisis yang membahas tentang Reaksi yang diberikan oleh Korea Selatan terhadap peningkatan uji coba senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari uraian pembahasan bab-bab sebelumnya.

BAB 2. GAMBARAN UMUM DAN KERJASAMA KOREA SELATAN-KOREA UTARA

Dinamika hubungan Korea Selatan dan Korea Utara ternyata telah melalui serangkaian sejarah yang panjang yang berawal dari era monarki hingga kolonialisme Jepang yang menyebabkan Korea terpecah menjadi dua yaitu Korea Selatan dan Korea Utara. Meskipun kedua negara sebangsa ini memiliki persamaan etnis dan latar belakang sejarah, namun pasca terpecahnya Korea menjadi dua negara dalam aspek politik-pemerintahan ternyata memiliki perbedaan yang menonjol, dimana Korea Utara berkembang sebagai negara sosialis-komunis, sedangkan Korea Selatan menjadi negara yang condong ke arah liberalis-demokratis.

Korea Selatan dan Korea Utara tumbuh dan berkembang secara berseberangan akibat aspek ideologi, politik dan kepemimpinan (*leadership*) yang berbeda. Meskipun demikian antara kedua negara tetap berupaya membangun kerjasama dalam skala yang tidak cukup besar. Pada bab II ini akan diuraikan momentum terpecahnya Korea, gambaran umum kedua negara, serta kerjasama antara Korea Selatan dan Korea Utara.

2.1. Momentum Terpecahnya Korea Selatan dan Korea Utara

Pasca perkembangan Korea pada era monarki kemudian Korea dihadapkan pada era kolonisasi asing. Pada masa ini, Jepang menjadi negara yang berhasil menjajah Korea yang pada akhirnya menimbulkan keterlibatan pihak-pihak yang lebih luas, diantaranya Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua negara ini memang memiliki beberapa kepentingan atas Korea sebagai *pivot point*.

Upaya Jepang untuk menaklukkan Korea merupakan ambisi negara ini yang berupaya menjadi Pemimpin Asia, Pelindung Asia dan Penerang Asia. Sedangkan keterlibatan Amerika Serikat adalah untuk mendukung Korea dalam memenangkan

perseteruan dengan uni Soviet yang pada masa itu berupaya mengembangkan komunisme dan fasisme.

2.2.1. Korea Dibawah Kolonisasi Jepang

Terbelahnya semenanjung Korea menjadi dua, yaitu Korea Selatan dan Korea Utara tidak lepas dari adanya pengaruh dari luar. Konstelasi politik dan keamanan Asia Pasifik ternyata mengalami perubahan yang dinamis pasca keputusan Jepang untuk terlibat dalam perang Pasifik melawan Sekutu. Kondisi ini menyebabkan berbagai dampak serius, termasuk terbelahnya Korea akibat perebutan pengaruh antara Sekutu yang berhasil mengembangkan pengaruh/hegemoninya di wilayah Selatan, sedangkan wilayah Utara menjadi obyek perluasan pengaruh/hegemoni Uni Soviet.

Latar belakang keterlibatan Jepang dalam Perang Pasifik yang juga menjadi latar belakang invasi Jepang ke semenanjung Korea disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pertama modernisasi Jepang akibat realisasi Restorasi Meiji yang salah satu ketentuannya menekankan pada keterbukaan Jepang, kepadatan penduduk dan pembatasan migrasi keluar negeri, khususnya dengan tujuan Amerika Serikat dan Australia. Hal inilah yang mendorong Jepang terlibat dalam Perang Pasifik. Modernisasi Jepang dimulai sejak tahun 1868. Sebelumnya Jepang merupakan negara yang tertutup (tahun 1839-1854) karena pelaksanaan politik isolasi, pada saat Jepang berada di bawah kepemimpinan Hidedata yang secara dogmatis menjalankan sistem penyelenggaraan negara tanpa berinteraksi dengan negara lain (Sing, 2001:13).

Keterlibatan Jepang hingga sampai di berbagai wilayah Asia dan sebagian Australia, juga tidak lepas dari taraf keberhasilan yang gemilang dalam memenangkan perang di beberapa negara Asia, antara lain yaitu : (Suharman, 2006:89)

1. Perang Cina-Jepang Tahun 1894-1895

Pecahnya perang Cina-Jepang tahun 1894-1895 dipicu oleh insiden penembakan kapal perang Jepang oleh Cina. Perang ini berkembang hingga

melibatkan Bangsa Korea, yang diperparah dengan keterlibatan Inggris dalam membantu Cina (Lan, 1962 : 196).

2. Perang Jepang-Rusia Tahun 1904-1905

Perang antara Rusia-Jepang yang terjadi pada rentang tahun 1904-1905, merupakan konsekuensi atas keterlibatan Rusia dalam mendukung Cina, pada saat menjadi obyek aneksasi Jepang. Pasca Perang Jepang-Cina, Rusia tidak bersedia untuk meninggalkan wilayah Cina, akibatnya hubungan antara Jepang dan Rusia semakin memanas dengan pemutusan hubungan diplomatik pada 10 Februari 1904.

Dalam konfrontasi dengan negara-negara besar di Asia, khususnya Rusia dan Cina, membuat sikap percaya diri Jepang semakin meningkat. Hal ini membuat Jepang berupaya untuk menaklukkan negara-negara Asia, serta berupaya mewujudkan imperium Asia dibawah kepemimpinannya.

Penguasaan Jepang atas wilayah Asia juga berlaku bagi wilayah Korea sebagai dua negara yang sama-sama terletak pada satu kawasan yaitu Asia Timur. Upaya Jepang terlibat dalam kolonisasi bangsa/negara asing, sekaligus menjadi fenomena yang unik dan diluar kebiasaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Yun Su yang merupakan guru busar pendidikan sejarah dari *Busan National University of Education* bahwa :

“...Japan's involvement in the war as possible being the only power imperialis from Asia captured almost half of the Asian region. Despite progress in a short period of time, but it's become a form of cruelty and exploitation. Although the cause of the outbreak, but Japan's colonization of Korea was also building a Korea ethnic nationalism.”(Su,2012:9)

(Keterlibatan Jepang dalam perang pasifik dimungkinkan menjadi satu-satunya kekuatan imperialis dari Asia yang berhasil menduduki hampir separuh wilayah Asia. Meskipun berlangsung dalam kurun waktu singkat, namun ini menjadi wujud kekejaman dan eksploitasi yang luar biasa. Meskipun menyebabkan pecahnya Korea, namun penjajahan Jepang juga turut membangun nasionalisme Korea).

Pendudukan Jepang atas Korea berawal sekitar tahun 1875. Pada tahun ini Jepang menempatkan kapal perang Unyo untuk menyerang Pulau Ganghwado dan Yeongjongo dan menuntut Joseon membuka wilayahnya bagi misi perdagangan asing. Pada akhirnya, Joseon terpaksa menandatangani Perjanjian sepihak

Ganghwado dengan Jepang pada tahun 1876. Kasus ini menyebabkan kekuatan imperialis, termasuk Jepang, bersaing satu sama lain untuk menguasai sumber daya milik Joseon. Pada tahun 1897, Joseon berubah nama menjadi Kekaisaran Korea dan dipaksa untuk melakukan reformasi dan kebijakan terbuka, namun terlambat (korean cultural center, 2017).

Dalam perkembangannya Jepang segera meraih kemenangan besar atas perang melawan dinasti Qing Tiongkok dan Rusia dan muncul sebagai kekuatan besar di Asia Timur Laut. Setelah itu Jepang mengambil langkah untuk mengambil alih Joseon. Banyak patriot Korea, termasuk Ahn Jung-geun, menentang rencana itu namun tidak berhasil. Seiring dengan berkembangnya waktu, pada tahun 1910 Jepang secara efektif menduduki Korea dalam Perjanjian Aneksasi Jepang-Korea. Rakyat Korea tidak menyetujui perjanjian yang tidak disahkan oleh Raja Gojong tersebut, namun Jepang tidak mempedulikan kemarahan rakyat Korea. Korea diduduki Jepang dengan bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Korea sampai dengan tahun 1945 ketika Jepang menyerah kepada tentara sekutu dan meninggalkan Korea (Korean cultural center, 2017).

Dalam mendukung kepentingan Jepang di Korea maka dibangunlah infrastruktur dasar, meliputi jalan trans, jembatan, komunikasi dan gudang pangan di seluruh wilayah Korea oleh pemerintahan kolonial Jepang dan hal ini mengarah kepada eksploitasi rakyat Korea. Semua fasilitas yang dibangun bertujuan untuk melancarkan kepentingan dan perdagangan Jepang, jadi bagi Korea sendiri hanya mendapat sedikit manfaat dari adanya modernisasi ini. Beberapa tindakan kekerasan dan eksploitasi yang dilakukan oleh Jepang atas Korea pada masa pendudukannya, adalah :

- a. Menghancurkan Istana Gyeongbokgung
- b. Memungut pajak dengan tarif yang tinggi terhadap hasil pertanian serta mengekspornya ke Jepang. Hal ini membuat rakyat Korea mengalami bencana kelaparan karena terbatasnya persediaan bahan pangan yang mereka miliki.
- c. Menyiksa dan membunuh warga yang menolak membayar pajak
- d. Kerja paksa untuk membangun jalan dan pertambangan

- e. Perbudakan seks yang dilakukan oleh para tentara-tentara Jepang terhadap wanita Korea
- f. Mengirimkan para pekerja Korea ke wilayah Jepang yang lainnya untuk melakukan kerja paksa (Korean cultural center, 2017).

Pendudukan Jepang atas Korea menyebabkan setidaknya 2 juta orang yang menjadi korban dalam masa penjajahan tersebut (Jepang mengklaim kurang dari 500 ribu orang). Banyak warga Korea yang dibunuh oleh tentara Jepang karena dianggap memberontak dan tidak mau mengikuti perintah mereka, termasuk sebuah desa yang bernama Jeamri yang seluruh penduduknya dibinasakan oleh para tentara Jepang karena mendukung perjuangan kemerdekaan dan hal itu dianggap dapat membahayakan eksistensi mereka. Pada tanggal 1 maret 1919 merupakan pergerakan awal bangsa Korea dalam memperjuangkan kemerdekaannya dari tangan kolonial Jepang. Pada saat itu terdapat jutaan rakyat Korea ikut berdemonstrasi secara damai, namun sekitar 7000 orang harus tewas akibat terbunuh oleh para tentara Jepang. Dari pergerakan 1 Maret 1919 ini Presiden Amerika, Wodrow Wilson terinspirasi untuk mendeklarasikan kebebasan hak asasi manusia.

Setelah terjadinya pergerakan nasional Korea pada tanggal 1 maret 1919, pemerintahan Provisional Republik Korea diresmikan di Shanghai, Cina untuk memperjuangkan kemerdekaan Korea. Pemerintahan provisional yang dibentuk di Shanghai tersebut dianggap sebagai pemerintahan de jure dari rakyat Korea dari tahun 1919 sampai tahun 1948. Seiring dengan berjalannya waktu, sentimen anti Jepang di Korea terus mencuat, seperti pada peristiwa protes mahasiswa di seluruh Korea pada bulan November 1929 yang membuat pengetatan peraturan militer pada tahun 1931. Protes mahasiswa tersebut disebabkan karena adanya modifikasi dalam kurikulum sekolah untuk menghilangkan pengajaran dalam Bahasa Korea. Sekolah juga dilarang untuk mengajarkan murid-muridnya mengenai sejarah bangsa Korea. Orang Korea juga dipaksa agar mengadopsi nama-nama orang Jepang. Dan dalam perang dunia ke II, banyak pula warga Korea yang dipaksa untuk menyokong usaha perang tentara Jepang.

2.1.2. Pemisahan Politik Korea Selatan- Korea Utara

Setelah masa pendudukan Jepang di Korea berakhir karena kekalahan Jepang pada Perang Dunia II tahun 1945, Korea dibagi menjadi dua wilayah berdasarkan garis 38 derajat lintang utara sesuai dengan perjanjian yang diadakan oleh PBB. AS dibagian selatan dan Uni Soviet di bagian utara. Dalam perkembangannya AS dan Uni Soviet tidak berhasil mencapai kesepakatan mengenai implementasi penyatuan Korea karena masing-masing memiliki ideologi yang berbeda dalam menjalankan hegemoninya di Semenanjung Korea. Hal ini mengakibatkan pembentukan pemerintahan yang terpisah dengan masing-masing pemerintah mengklaim memiliki wilayah resmi atas seluruh Korea.

Perang Korea adalah perang yang terjadi antara Korea Selatan dan Korea utara yang pertama kali pecah pada tanggal 25 Juni 1950. Perang ini sempat berhenti sementara karena adanya perjanjian gencatan senjata oleh kedua negara yang ditandatangani pada 27 Juli 1953. Konflik yang terjadi kemudian berkaitan dengan upaya masing-masing Korea dalam menyatukan kembali negara ini seperti dahulu dibawah pemerintahan mereka masing-masing (Kamasa, 2016:273). Lebih dari 2 juta penduduk sipil dan prajurit Korea Selatan dan Korea Utara yang tewas akibat dari perang tersebut. Periode sebelum perang ditandai dengan konflik perbatasan pada paralel utara ke-38 dan upaya negosiasi pemilihan umum bagi keutuhan Korea. Namun negosiasi tersebut gagal dalam menemukan kata sepakat dan berakhir ketika Tentara Rakyat Korea menyerbu Korea Selatan pada 25 Juni 1950. Atas seizin PBB, Amerika Serikat dan sekutunya ikut mendukung Korea Selatan. Setelah serangan balasan yang dilakukan oleh Korea Selatan dengan bantuan AS dan sekutunya, tentara Uni Soviet pun turun tangan dalam mendukung Korea Utara, dan karena adanya perimbangan kekuatan maka pada akhirnya perang tersebut mengarah kepada gencatan senjata yang hampir memulihkan kembali perbatasan awal antara Korea Utara dan Korea Selatan (History, 2017).

Pada tahun 1948 Pemerintah Amerika Serikat menyatakan reaksi keras atas dukungan Uni Soviet terhadap Korea Utara. Kemudian pada tahun 1950 Amerika Serikat berhasil memberikan dukungan kepada Korea Selatan untuk dapat membentuk negara moderen dengan disertai mandat dan legitimasi dari

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hubungan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan ini kemudian dikenal dengan ‘tripwire’, dimana Amerika Serikat dan sekutunya akan bertanggung-jawab secara langsung untuk menjamin keamanan dan melindungi Korea Selatan dari serangan negara-negara luar.

Kemudian Uni Soviet menganggap bahwa kedekatan Korea Selatan dengan Amerika Serikat bersama dengan sekutunya merupakan tindakan koersif dan intervensi politik. Untuk itulah, uni Soviet kemudian melancarkan sikap perang melalui dukungannya pada Korea Utara pada invasi 25 Juni 1950.

Sejak gencatan senjata pada tahun 1953, hubungan antara pemerintah Korea Utara dengan Korea Selatan, Uni Eropa, Kanada, Amerika Serikat, dan Jepang masih tetap dalam keadaan tegang. Walaupun pertempuran sudah dihentikan dengan gencatan senjata, namun secara teknis kedua negara ini masih berada dalam keadaan perang. Kedua negara menandatangani Deklarasi Gabungan antara Utara-Selatan pada 15 Juni 2000, dalam deklarasi tersebut kedua belah pihak berjanji untuk mengupayakan penyatuan kembali dengan cara damai. Selain itu pada 4 Oktober 2007, para pemimpin dari kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan rapat puncak untuk membicarakan pernyataan penghentian perang secara resmi dan mengukuhkan kembali prinsip-prinsip non-agresi (History, 2017).

Korea Utara dan Korea Selatan tidak pernah menandatangani perjanjian damai dan dengan demikian secara resmi kedua negara ini masih dalam status perang; hanya sebuah gencatan senjata yang diumumkan pada tahun 1953. Upaya perdamaian disela oleh beberapa pertempuran kecil dan upaya pembunuhan yang dilakukan oleh Korea Utara terhadap pemimpin Korea Selatan. Namun, Korea Utara gagal dalam beberapa upaya pembunuhan terhadap pemimpin Korea Selatan tersebut, dengan yang paling dikenal pada tahun 1968, 1974, dan Pengeboman Rangoon pada tahun 1983. Banyak ditemukan terowongan-terowongan bawah tanah di Zona Demiliterisasi, dan karena hal ini perang hampir meletus kembali akibat Insiden Pembunuhan Kapak di Panmunjeom pada tahun 1976. Pada tahun 1973, hubungan tingkat tinggi yang sangat rahasia mulai dilakukan melalui kantor-kantor Palang Merah, tetapi berakhir setelah insiden Panmunjeom (Songbun, 2017).

2.2. Profil Korea Utara dan Korea Selatan

Korea Utara dan Korea Selatan merupakan dua negara yang terpisah akibat adanya persetujuan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang kemudian melibatkan Tiongkok, setelah sebelumnya menjadi bagian dari kolonisasi Jepang. Pengaruh Uni Soviet pasca perang dunia-II membuat kepemimpinan di Korea Utara cenderung anti Barat dan demikian juga halnya dengan Korea Selatan yang cenderung menolak eksistensi paham komunis. Meskipun kedua negara berseberangan dalam aspek politik, namun secara sosial bangsa Korea memiliki eksistensi sebagai bangsa yang solid di luar negeri.

2.2.1 Profil Korea Utara

Korea Utara merupakan negara yang berada di wilayah Asia Timur yang perkembangan sosial-politiknya telah melalui serangkaian sejarah yang panjang. Sebelum era kolonisasi Jepang, sebenarnya Korea Utara masih bergabung menjadi satu dengan Korea Selatan mulai dari Dinasti Goryeo, Joseon dan beberapa dinasti sebelumnya sampai dengan era kolonisasi Jepang yang menyebabkan Korea terpecah menjadi dua. Korea Utara berbatasan langsung dengan Laut Jepang di sebelah Timur, Korea Selatan di sebelah Selatan, Republik Rakyat China (RRC) di sebelah Barat dan Rusia di sebelah Utara (*Central intelligence agency, 2017*).

Secara geografis Korea Utara berada di kawasan Asia Timur di bagian utara Semenanjung Korea. Korea Utara berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok yang dipisahkan oleh Sungai Amnok, dengan Rusia oleh Sungai Duman serta Korea Selatan oleh Zona Demiliterisasi Korea (DMZ). Gambaran tentang letak geografis Korea Utara dapat dilihat peta 2.1. sebagai berikut :



Gambar 2.1 Peta Wilayah Geografis Korea Utara (Sumber : Diolah dari “North Korean Larger Picture Maps”, diakses dari <https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/lcolor/kpcolor.htm>, pada tanggal 22 Mei 2018)

Dalam perkembangannya, setelah berpisah dengan Korea Selatan sistem yang dianut oleh Korea Utara ternyata semakin mengarah kepada pola otoritarianisme. Hal ini dapat dilihat dari penerapan konsep Juche atau kepercayaan diri yang begitu besar atas kemampuan untuk dapat mandiri tanpa bergantung dengan negara lain. Selain itu, bentuk otoritarianisme lainnya adalah pemujaan berlebihan terhadap kepribadian Kim Il Sung dan Kim Jong Il secara terorganisir sekaligus mengangkatnya sebagai presiden abadi (Songbun, 2016).

Sejak tahun 1994 di bawah kepemimpinan Kim Jong Il, Korea Utara menjadi negara yang berusaha hidup tanpa bantuan dari negara lain dengan kata lain bahwa Kim Jong Il menginginkan agar Korea Utara dapat bergerak dengan

prinsip berdikari. Politik yang dibangun tersebut membuat masyarakat Korea Utara harus menerima kenyataan hidup dengan pertumbuhan ekonomi negara yang rendah. Ini sebagai konsekuensi atas sistem kebijakan luar negeri yang dogmatis dan tertutup.

Secara politik, Korea Utara menganut sistem mono-partai atau partai tunggal yang merupakan aliansi dari Partai buruh Korea dengan partai minor lainnya yaitu Partai Demokratik Sosial Korea dan Partai Chongu Chonduis. Aliansi ini kemudian berhasil mengisi parlemen Korea Utara di Pyongyang dan sekaligus mendukung legitimasi pemerintah Korea Utara. Dengan kata lain, secara tekstual memang Korea Utara memiliki beberapa partai politik, namun keberadaannya hanya sebagai pelengkap (*complementary party*) karena pada akhirnya juga akan berafiliasi dengan partai mayor pro-pemerintah (Libertyinnorthkorea, 2017).

Sedangkan pada rasio pertumbuhan penduduknya, Korea Utara termasuk negara yang memiliki jumlah rasio pria yang lebih rendah daripada wanita. Dimana rasio perbandingan pria banding wanita adalah 86,2 : 100 pada tahun 1980 dan menurun menjadi 84,2 : 100 pada tahun 1987. Rendahnya rasio pria berbanding wanita ini dimungkinkan akibat dari pasca perang, namun sepertinya hasil ini lebih rendah daripada yang pernah dicatat pada tahun 1953, yaitu 88,3 : 100, tahun dimana berakhirnya Perang Korea. Dengan berjalannya waktu, Rasio pria : wanita berangsur-angsur kembali normal, seperti yang terjadi antara tahun 1953 dan 1970, saat angka menunjukkan kenaikan menjadi 95,1 : 100 (Indexmundi, 2017).

Pasca dekade 1970 tren dan rasio ini menunjukkan kecenderungan menurun. Eberstadt dan Banister memperkirakan bahwa sebelum tahun 1970, figur populasi pria-wanita dihitung secara keseluruhan dibuktikan dengan tingginya rasio pria yang mencapai 90-an persen. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *Central Statistics Bureau*, Eberstadt dan Banister memperkirakan jumlah pria yang tidak terdeteksi mencapai 1,2 juta pada tahun 1986 dan rasio pria-wanita yang sebenarnya adalah 97,1 banding 100 pada tahun 1990. Jika taksiran mereka benar, berarti 6,1 persen jumlah populasi Korea Utara adalah angkatan militer, dan hal ini membuat angkatan militer Korea Utara menempati urutan ke-5 terbesar di dunia pada akhir dekade 80-an (Worldatlas, 2017).

Perkembangan pertumbuhan populasi Korea Utara meningkat, yang semula hanya 2,7% pada tahun 1960 menjadi 3,6% pada tahun 1970, lalu menunjukkan penurunan pada tahun 1975 menjadi 1,9%. Hal ini diakibatkan oleh menurunnya angka fertilitas yaitu angka rata-rata anak yang dilahirkan, pada tahun 1966 angka fertilitas mencapai 6,5% dan menurun menjadi 2,5% pada tahun 1988. Kemudian pada tahun 1991 angka kelahiran yang tercatat adalah 20,01 kelahiran/ 1,000 populasi, pada tahun 1996 tercatat 17,58 kelahiran/1,000 populasi, pada tahun 2006 tercatat 14,61 kelahiran/ 1,000 populasi, pada tahun 2008 tercatat 14,61 kelahiran/ 1,000 populasi. Sedangkan untuk angka kematian, pada tahun 1991 tercatat 8,94 kematian/ 1,000 populasi, pada tahun 1996 tercatat 9,52 kematian/ 1,000 populasi, pada tahun 2006 tercatat 7,29 kematian/1,000 populasi dan 7,29 kematian/1.000 populasi pada tahun 2005-2010. Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah pertumbuhan populasi Korea Utara mengalami tren penurunan (Worldatlas, 2017).

Kemudian dilihat dari faktor religius, maka Korea Utara terdiri dari beberapa kepercayaan, yaitu :

- a. Penduduk yang tidak menganut agama apapun: 15.460.000 pengikut (64,31% penduduk, mayoritas yang dominan, mereka adalah penganut filsafat Juche)
- b. Penduduk yang menganut kepercayaan Shamanisme Korea: 3.846.000 pengikut (16% penduduk)
- c. Penduduk yang menganut kepercayaan Cheondoisme: 3.245.000 pengikut (13,50% penduduk)
- d. Penduduk yang memeluk agama Buddha: 1.082.000 pengikut (4,50% penduduk)
- e. Penduduk yang memeluk agama Kristen: 406.000 pengikut (1,69% penduduk) (worldatlas, 2017).

2.2.2. Profil Korea Selatan

Korea Selatan adalah negara yang terletak di Asia Timur, tepatnya mencakup bagian selatan Semenanjung Korea pada koordinat 37 00 N, 127 30 E.

Korea Utara adalah satu-satunya negara yang berbatasan langsung dengan Korea Selatan dengan panjang perbatasan 238 km yang ditetapkan sebagai DMZ (Garis Demarkasi Militer). Negara ini berada di antara 124°BT- 130°BT dan 33°LU- 39°LU (Chong Wa Dae, 2017).

Secara geografis, Korea Selatan berbatasan darat dengan Korea Utara disebelah utaranya sedangkan sebelah timur, selatan dan barat dikelilingi oleh wilayah perairan. Wilayah Korea Selatan sebagian besar dikelilingi perairan dan memiliki panjang garis pantai 2.413 km. Sebelah barat dibatasi oleh Laut Kuning, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur, sebelah timur berbatasan dengan perairan Laut Jepang, sedangkan di sebelah tenggaranya adalah selat Korea yang berbatasan dengan Jepang. Luas wilayah daratan keseluruhan adalah 99.678 km² (International trade centre, 2017).

Korea Selatan yang terdiri dari semenanjung yang memiliki sekitar 3200 buah pulau yang besar dan kecil, terletak di bagian timur laut dari benua Asia. Korea terletak bersebelahan dengan wilayah laut, Rusia dan Cina dari arah ke utara, serta berhadapan dengan Jepang dari arah selatan. Gambaran wilayah Korea Selatan lihat peta 2.2. sebagai berikut :



Gambar 2.2 Peta Wilayah Geografis Korea Selatan (Sumber : diolah dari “South Korean Larger Picture Maps”, diakses dari <https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/lcolor/krcolor.htm>, pada tanggal 22 Mei 2018)

Pada bidang politik dan pemerintahan, Korea Selatan merupakan negara yang bersistem pemerintahan Republik Presidensial. Berdasarkan sistem Presidensial yang dianut oleh Korea Selatan ini, Kepala Negara dijabat oleh seorang Presiden yang dipilih oleh rakyat berdasarkan hasil Pemilihan Umum untuk masa jabatan 5 tahun. Sedangkan Kepala Pemerintahannya dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang ditunjuk oleh Presiden (OECD, 2017).

Korea Selatan pada dekade 2000-an memiliki jumlah penduduk sebanyak 50.924.172 jiwa dengan bahasa resminya adalah bahasa Korea. Agama Kristen (Katolik, Protestan) dan Agama Buddha merupakan agama mayoritas di negara tersebut namun sebagian besar penduduk Korea Selatan memilih untuk tidak beragama atau atheisme. Korea Selatan merupakan salah satu negara dengan angka

kelahiran terendah di dunia yaitu sekitar 8,4 bayi per 1000 penduduk Korea Selatan (Worldpopulationreview, 2018).

Korea Selatan termasuk sebagai salah satu Negara maju di dunia dengan pendapatan domestik bruto yang tinggi dan menduduki peringkat ke-13 dunia (tahun 2016) dengan nilai sebesar US\$. 1,929 triliun sedangkan Pendapatan Perkapita Korea Selatan adalah US\$. 37,900. Korea Selatan mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, industri-industri besar yang bermunculan merupakan tulang punggung atau sumber pemaksaan terbesar bagi perekonomian Korea Selatan diantaranya seperti produk Elektronik, Telekomunikasi, Otomotif, kimia, perkapalan dan industri baja. Merek-merek terkenal yang sering kita dengar seperti Samsung, LG, Hyundai, KIA, Daewoo dan Lotte adalah beberapa contoh perusahaan besar yang berasal dari Korea Selatan (Pham, 2016).

Kemudian pada dinamika Hubungan Luar Negeri, Korea Selatan merupakan salah satu anggota PBB dan lembaga-lembaga PBB lainnya. Ban Ki-moon yang sebelumnya merupakan Menteri Luar Negara Korea Selatan pernah menjabat sebagai Sekjen PBB selama dua periode, mulai dari tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2016. Selain sebagai anggota PBB, Korea Selatan juga berperan aktif dalam beberapa organisasi internasional seperti G-20, OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*), APEC (*Asia Pacific Economic Forum*) dan Konferensi Tinggi Asia Timur.

2.3. Kerjasama Korea Selatan dan Korea Utara

Terbelahnya Semenanjung Korea akibat kolonisasi Jepang pada masa lalu, kemudian mampu berperan sebagai tonggak sejarah (milestone) bagi terbentuknya kedaulatan Korea Utara dan Korea Selatan. Meskipun Korea Selatan dan Korea Utara merupakan dua negara bersaudara, namun akibat perseteruan dan orientasi kepemimpinan, potensi ancaman akibat pengembangan sistem persenjataan, termasuk senjata nuklir dan WMD membuat rekonsiliasi yang mengarah ke reunifikasi masih sulit untuk tercapai.

Kerjasama antara Korea Selatan dan Korea Utara sebenarnya telah terjalin pada 1945 bersamaan dengan pembagian dua Korea. Dalam perkembangannya, hubungan antara dua Korea, yaitu Selatan dan Utara pada akhirnya pun mengalami pembekuan bersamaan dengan terjadinya perang Korea 1950. Seiring dengan berkembangnya waktu, Korea Selatan berkembang sebagai negara demokratis dan liberal yang berhasil membangun kerjasama bilateral dengan berbagai negara di dunia yang meliputi 95 negara, di wilayah Asia, Eropa, Afrika, Amerika dan Australia-Oceania (Hwang and Kwon, 2016:29).

Keberadaan Korea Utara sebagai negara sosialis-komunis yang cukup tertutup juga berupaya mengembangkan kerjasama luar negerinya dalam mewujudkan pencapaian kepentingan nasional. Dalam melegitimasi posisinya di dunia internasional, Korea Utara menjalankan berbagai kerjasama luar negeri, diantaranya dengan 77 negara dunia, diantaranya Angola, Brazil, Vietnam, Turki, Uganda, Afrika Selatan hingga Amerika Serikat dan Uni Eropa sebagai dua pihak yang sering berseberangan dengan politik luar negeri Korea Utara. Bahkan Korea Utara juga menjalankan kerjasama dengan negara sebangsa yang juga rivalnya yaitu Korea Selatan (Hwang and Kwon, 2016:29).

Bangsa Korea berhasil mengalami dinamika yang progresif yang kemudian tersebar di berbagai wilayah/negara dunia, diantaranya :

- a. Tiongkok dengan jumlah Bangsa Korea sekitar 2,3 juta jiwa.
- b. Amerika Serikat dengan jumlah Bangsa Korea sekitar 2,08 juta jiwa.
- c. Jepang dengan jumlah Bangsa Korea sekitar 901 ribu jiwa.
- d. Negara-negara pecahan Uni Soviet dengan jumlah Bangsa Korea sekitar 532 ribu jiwa.
- e. Brazil dengan jumlah Bangsa Korea sekitar 240 ribu jiwa (Hwang and Kwon, 2016:29).

Di era moderen Korea Selatan dan Korea Utara tumbuh dan berkembang sebagai entitas yang menjadi perhatian internasional. Ini disebabkan oleh beberapa hal, *Pertama*, Korea Utara menjadi negara yang dihadapkan pada berbagai persoalan, diantaranya kemiskinan dan keterbelakangan, namun sangat impresif dalam mengembangkan sistem persenjataan mutakhir. *Kedua*, Korea Selatan

tumbuh sebagai negara adikuasa baru pada bidang ekonomi dan manufaktur sebagai *growth miracle countries* dan *Ketiga*, perkembangan Korea Utara dan Korea Selatan menjadi persoalan keamanan yang lebih besar yaitu persoalan keamanan laut Tiongkok Selatan (Hwang and Kwon, 2016:117).

Berkaitan dengan perkembangan Korea Selatan dan Korea Utara pada era moderen, Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan menyatakan bahwa :

"...South Korea and North Korea to the attention of the United Nations, not just achievement in the field of politics, but also potential problems will occur. Nuclear issue until the border dispute could have triggered a greater war. To that end, the United Nations needs more attention upon the condition of the two countries, in addition to the issue of conflicts in Africa, the Balkans and the Middle East. "(Kaufman, 2015:102)

(Korea Selatan dan Korea Utara menjadi perhatian PBB, bukan hanya karena pencapaian pada bidang politik, namun juga potensi persoalan yang akan terjadi. Masalah nuklir hingga sengketa perbatasan dapat saja memicu terjadinya perang yang lebih besar. Untuk itu, PBB perlu memberikan perhatian lebih atas kondisi kedua negara tersebut, selain masalah konflik Afrika, Balkan dan Timur-tengah).

Hingga dekade 1980-an, hubungan kerjasama secara formal antara Korea Selatan dan Utara tidak berhasil dijalankan. Kegagalan kerjasama ini tidak lepas dari pengaruh pecahnya perang terbuka tahun 1950 yang menyebabkan sulitnya kedua negara untuk mencapai reunifikasi. Dari kerjasama antar pemerintah (*government to government*) hanya pengembangan proyek Kaesong yang terus dipertahankan kedua negara di wilayah yang berdekatan dengan zona demiliterisasi.

Dinamika hubungan Korea Selatan dan Korea Utara, serta potensi kerjasama diantara kedua negara ternyata cukup potensial pada sektor non-pemerintah yaitu swasta (*business*) dan masyarakat. Sejak tahun 1990-an muncul beberapa fenomena menarik tentang perkembangan kerjasama kedua negara secara progresif. Gambaran tentang hal ini lihat tabel 2.1. sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perkembangan Kontak Kerjasama Non-Pemerintah Antara Korea Selatan dan Korea Utara

No.	Bidang	Keterangan
1.	Interaksi Antar Masyarakat	Terjadi peningkatan sejak tahun 1980 melalui jalur darat melalui Uheon dan Incheon sekitar 500-600 orang perbulan dan kemudian meningkat di tahun 1990 menjadi 900-100 orang perbulan.
2.	Perdagangan skala kecil <125 US Dollar perbulan	Meningkat sekitar hingga 120% antara tahun 1980 hingga 1990 meliputi bahan pangan, obat-obatan dan suku cadang.
3.	Perdagangan skala menengah >500 US Dollar perbulan	Meningkat sekitar hingga 80%-90% antara tahun 1980 hingga 1990 meliputi bahan suku cadang, elektronika,
4.	Pengembangan kebudayaan dan seni	Mulai berkembang sejak dekade 1990 secara terbatas.

(Sumber : diolah dari Daniel L. Chubb, *The Two Korean : Politic, Economy and Society*, routledge Publishing, London and New York, 2015, hal.34,45 dan 42).

Berbagai upaya bagi kedua negara untuk merintis berbagai bentuk kerjasama, diantaranya dengan membangun kerjasama ekonomi dan manufaktur di wilayah Kaesong yang berdekatan dengan wilayah demiliterisasi Korea dengan harapan dapat mendekatkan diri bagi hubungan kedua negara, namun tetap banyak mengalami kegagalan. Keberadaan kawasan industri Kaesong yang sebenarnya dapat menjadi sarana dalam mendukung reunifikasi pada akhirnya dihadapkan pada berbagai persoalan kontra produktif yang berujung pada penutupan kawasan industri tersebut. Gambaran tentang penutupan kawasan industri Kaesong akan diuraikan pada pembahasan bab selanjutnya (bab III).

BAB 3. DINAMIKA KERJASAMA KOREA SELATAN DAN KOREA UTARA DI KAWASAN INDUSTRI KAESONG

Dinamika hubungan Korea Selatan dan Korea Utara yang cenderung kembali memburuk pada tahun 2003 ternyata masih menyisakan beberapa proyek kerjasama pada bidang ekonomi, khususnya pada sektor manufaktur, diantaranya adalah kerjasama di kawasan industri Kaesong. Kerjasama industri di wilayah Kaesong ini lahir dari kebijakan *Sunshine Policy* oleh mantan Presiden Korea Selatan Kim Dae-Jung dan reformasi kebijakan ekonomi Korea Utara oleh Kim Jong-Il. Kebijakan ini menginginkan agar kedua negara dapat hidup berdampingan secara damai, termasuk prospek bantuan dan kerjasama ekonomi bilateral serta proposal reunifikasi jangka panjang. Salah satu agenda dalam *Sunshine Policy* adalah pembuatan suatu bentuk kerjasama ekonomi yang berlokasi di Korea Utara dengan nama *Kaesong Industrial Complex*. Kawasan ini didirikan pada tahun 2002 dan mulai beroperasi sejak Desember 2004. Dalam Kawasan industri Kaesong ini terdapat ratusan perusahaan yang juga mempekerjakan tenaga kerja Korea Utara.

Kawasan Kaesong merupakan wilayah administrasi khusus yang terhubung dengan infrastruktur jalan raya dan kereta api antara Korea Selatan dan Korea Utara. Pada tahun 2016 pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk menutup kawasan industri ini. Pada bab III ini akan diuraikan lebih lanjut tentang deskripsi kawasan industri Kaesong, kerjasama Korea Selatan dan Korea Utara di kawasan industri Kaesong, hingga ketegangan hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara.

3.1 Deskripsi Kawasan Industri Kaesong

Kompleks Industri Kaesong adalah hasil dari sebuah inisiatif yang dipimpin oleh Hyundai Grup pada tahun 1998 yang bertepatan dengan kebijakan *Sunshine Policy* oleh Korea Selatan yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Kawasan industri Kaesong terletak pada sebuah

kota yaitu Kaesong yang menjadi bagian dari distrik Provinsi Hwang Hae, Korea Utara. Kawasan Industri Kaesong terletak sekitar 106 mil sebelah tenggara ibukota Korea Utara dan 43 mil sebelah utara ibukota Korea Selatan di seberang zona demiliterisasi di Korea Utara. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Korea Selatan yang sekaligus menjadi zona demiliterisasi, dimana sebelum terjadinya Perang Korea, Kaesong masuk dalam wilayah kedaulatan Korea Selatan. Total wilayah Kaesong adalah sekitar 1,390 km dengan total populasi penduduk sekitar 192 ribu jiwa pada tahun 2010 (Britanica, 2016).

Dilihat dari situs world-atlas bahwa pada masa lalu, Kaesong merupakan salah satu bagian penting dari peradaban Korea, dimana wilayah ini merupakan salah satu dari pusat kekuasaan Kekaisaran Monwondae. Dipilihnya Kaesong pada masa ini diperkirakan karena adanya beberapa alasan, *pertama*, wilayah yang cukup strategis karena terletak di wilayah tengah Korea. Kedua, sumber daya manusia dan alam yang mencukupi. Serta ketiga, akses yang memadai yang mudah dijangkau dari berbagai penjuru wilayah di Korea. Pada bulan desember 2007, kedua Korea mengumumkan layanan kereta harian di zona demiliterisasi sepanjang jalur rel yang baru-baru ini akan menghubungkan kembali antara kedua Korea. Rencananya kereta ini untuk menghubungkan Kawasan Industri Kaesong ke Korea Selatan di selatan dan ke Cina di utara. Sementara itu, Kaesong terhubung ke Korea Selatan dengan jalan yang memiliki ribuan kendaraan per hari yang melewati pos pemeriksaan. Oleh karena itu, akses transportasi menuju Kawasan industri Kaesong sudah di dukung dengan sistem transportasi moderen, sehingga keberadaannya sangat jauh dari citra Korea Utara yang tertutup. Transportasi ini meliputi jalur kereta api, yaitu *Korean state Railway*, jalur darat yaitu *South Korean Route 1* dan jalur udara melewati *Sohung Nation airport*.

Keberadaan wilayah Kaesong memiliki peranan penting bagi Korea Utara karena selain sebagai kawasan industri khusus, wilayah ini juga sebagai penghasil air baku. Selain itu, Kaesong juga menjadi salah satu wilayah termaju di Korea Utara karena wilayah ini telah berhasil membangun kerjasama *Sister City*, diantaranya dengan kota Cusko-Peru, Kathmandu-Nepal, Kota Baiti-Moldova dan

Ryazan-Rusia. Gambaran mengenai wilayah Kaesong lihat peta 3.1. sebagai berikut:



Gambar 3.1 Peta Wilayah Geografis Kawasan Industri Kaesong (Sumber : “Closing Kaesong”, diakses dari <https://foreignpolicyblogs.com/2016/02/25/discarding-kaesong-reviving-the-cold-war-on-the-korean-peninsula/>, pada tanggal 24 September 2017).

Tujuan dari KIC untuk kedua Korea sebagian besar menjadi dua: ekonomi dan politik. Untuk Korea Selatan, dua gol tersebut muncul untuk membuat satu gol menyeluruh untuk menstimulir transformasi Korea Utara. Menurut perusahaan pengembang properti, kunci dari Kaesong, KIC adalah proyek ekonomi, dimana tujuan pertamanya adalah untuk memicu integrasi pasar antara kedua Korea dengan menciptakan aset ekonomi, infrastruktur fisik, dan perdagangan di zona perang potensial. Tujuan kedua adalah untuk menciptakan saling menguntungkan ekonomi

dengan menggabungkan keunggulan komparatif Korea Selatan dalam modal dan teknologi dengan keunggulan komparatif Korea Utara dalam tenaga kerja dan lahan. Pada bidang politik, tujuan utamanya adalah untuk memimpin Korea Utara agar terlibat dalam bentuk-bentuk alternatif dialog keamanan dalam jangka panjang dengan menciptakan taruhannya ekonomi dalam kerjasama politik. Tujuan kedua adalah untuk menciptakan keterlibatan ekonomi untuk membawa Korea Utara dari isolasi dan untuk menghindari runtuhnya rezim sepenuhnya. Untuk Utara, KIC merupakan sumber penting dan salah satu sumber devisa bagi negara. Selain itu, KIC memberikan Kim Jong-Il kesempatan untuk bereksperimen dengan marketisasi dalam lingkungan yang terkendali. Dalam keadaan yang putus asa untuk kebangkitan ekonomi, KIC adalah kesempatan emas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Korea Utara dengan modal dan teknologi dari Selatan (Yun and Jaesuk, 2009: 186).

3.2 Kerjasama Korea Selatan - Korea Utara di Kawasan Industri Kaesong

Korea Selatan dibawah pimpinan Kim Dae Jung (1998-2003) menetapkan sebuah kebijakan yang disebut dengan Kebijakan Sinar Matahari (*Sunshine Policy*) yang bertujuan untuk mengajak Korea Utara masuk kedalam masyarakat Internasional. Kebijakan ini menginginkan agar kedua negara dapat hidup berdampingan secara damai, termasuk prospek bantuan dan kerjasama ekonomi bilateral serta proposal reunifikasi jangka panjang. KTT bersejarah antara Kim Dae-Jung dan Kim Jong-Il terjadi pada Juni 2000 yang memberi harapan baru bagi rekonsiliasi kembali kedua negara ini (Wrobel, 2014: 127). Dengan adanya kebijakan ini hubungan kedua Korea berangsur membaik. Hal ini merupakan keberhasilan upaya damai oleh pihak Korea Selatan. Keberhasilan Presiden Kim juga ditunjukkan dengan adanya kesepakatan antara kedua Korea dalam membuka 4 proyek kerjasama. Kesepakatan ini termasuk dengan adanya pemulihan hubungan dalam bidang ekonomi sebagai usaha untuk menyatukan Korea, melalui pembuatan suatu bentuk kerjasama ekonomi yang berlokasi di Korea Utara dengan nama

Kaesong Industrial Complex. Kerjasama ekonomi ini merupakan wujud integrasi dalam bidang-bidang non-politik yang diharapkan dapat semakin meluas apabila unit-unit yang terlibat mendapatkan keuntungan dan terlibat secara langsung dalam integrasi tersebut.

Kaesong sendiri kemudian berkembang menjadi faktor yang bisa mencegah terjadinya perang di semenanjung Korea. Kaesong juga memberikan harapan bagi kedua negara untuk tetap menjalin kerjasama yang baik. Meskipun Kaesong sendiri tidak luput dari isu dan permasalahan, namun Kaesong tetap berjalan dengan lancar. Keberhasilan Kaesong juga memberikan peluang bagi Korea Utara dan Korea Selatan untuk menjalankan kepentingan negara mereka masing-masing. Dengan tujuan yang berbeda, Kaesong mampu menjadi penengah situasi di Semenanjung Korea.

Pada September 1999 sebuah rencana dalam pengembangan kompleks industri disiapkan oleh Hyundai yang secara eksplisit menyatakan bahwa Kangryoung-gun, Haeju-bay and Hwanghaenam-do sebagai tempat yang prospektif untuk pembangunan kompleks industri baru. Rencana ini menyatakan pembangunan kompleks baru yang membutuhkan 6.400ha lahan. Selain itu, termasuk rencana untuk membangun kompleks industri dalam tiga fase pembangunan selama 8 tahun. Pada pertemuan kedua antara Chung Ju-Yung dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-Il yang terjadi pada tahun 1999, keduanya memutuskan untuk mengembangkan sebuah kompleks industri, dan menerima dukungan dari perusahaan Korea Selatan. Namun pada saat itu Kim Jong-Il menyatakan Sinuiju yang berada di sungai Yalu sebagai kandidat utama untuk kompleks tersebut. Namun, pada pertengahan tahun 2000 Hyundai Asan dan pemerintah Korea Utara menetapkan Kaesong sebagai lokasi untuk pembangunan kompleks industri bersama antara kedua Korea (Wrobel, 2014: 129).

Hyundai Asan menyadari bahwa tidak akan ada kemungkinan sukses untuk proyek semacam ini tanpa adanya kerjasama politik antar-Korea yang lebih dalam. Oleh karena itu Hyundai Group mengusulkan adanya pertemuan puncak (KTT) antara Pemimpin Korea Utara Kim Jong-Il dan Presiden Korea Selatan Kim Dae-Jun, yang berlangsung pada Juni 2000. Untuk mengamankan hak bisnisnya dalam

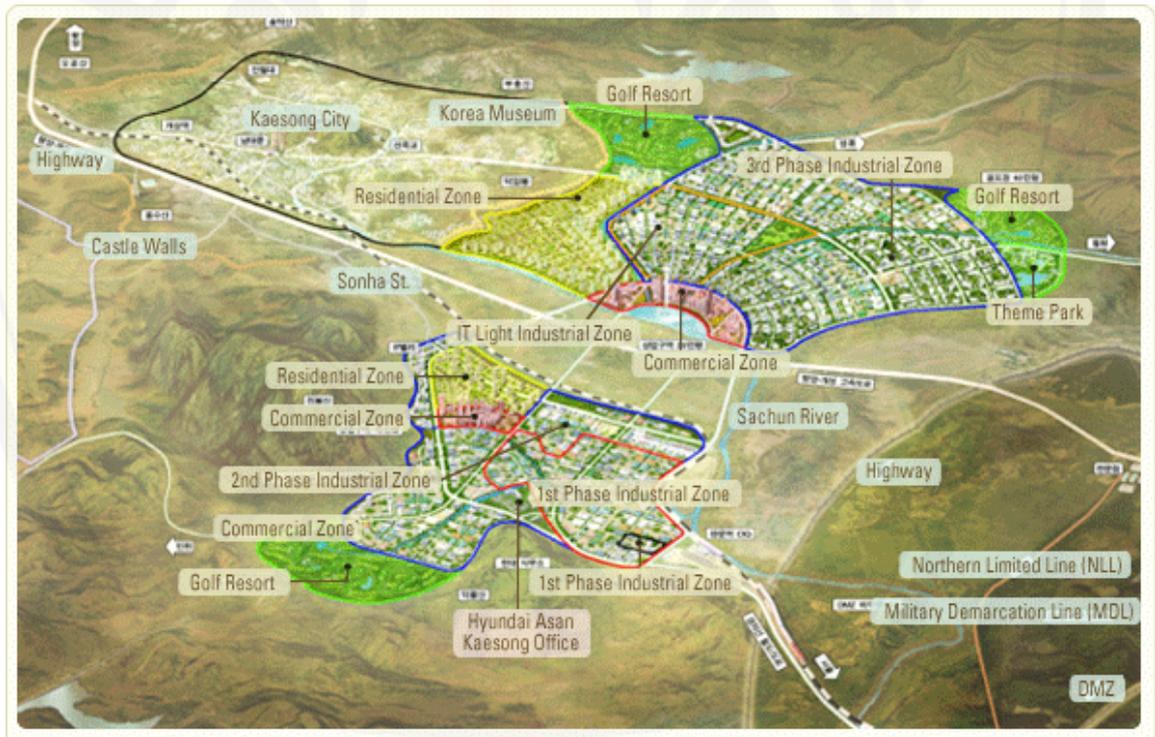
proyek investasi baru ini, Hyundai Asan membayar sebanyak 500 juta USD ke Korea Utara sebelum KTT ini berlangsung. Pada KTT ini, Presiden Kim mengajukan lima proyek kerjasama ekonomi dengan Korea Utara, yaitu: menghubungkan jalan dan rel kereta api antara Korea Selatan dan Korea Utara, mengembangkan gunung Kungang di Korea Utara sebagai objek wisata, memungkinkan perjalanan ke pegunungan ini melalui jalur darat, dan kompleks industri Kaesong (Wrobel, 2014: 129-130).

Dengan memperoleh dukungan dari Presiden Kim pada tanggal 22 Agustus 2000, Hyundai memulai proyek pada kompleks industri kaesong dengan menandatangani perjanjian dengan *North Korean Chosun Asia Pasific Peace Committee (APPC)* di KIC yang mencakup lebih dari 6.400ha. sebagai lahan industri dan 9.600 ha sebagai zona pendukung (Wrobel, 2014: 130). Zona pendukung sesuai kesepakatan adalah zona yang akan dibangun untuk kepentingan-kepentingan para pekerja di KIC. Zona pendukung tersebut terdiri dari zona hunian (tempat tinggal) seluas 960 hektar (untuk sekitar 30.000 staf manajemen Korea Selatan yang tinggal di KIC), zona perdagangan seluas 240 hektar (sebagai lahan untuk pembangunan kantor, hotel, ruang rapat, restoran), kawasan wisata seluas 1.200 hektar (resor golf, taman hiburan, taman damai), ekspansi tambahan seluas 4.000 hektar, dan kota Kaesong yang ada seluas 3.200 hektar. Kedua belah pihak menyetujui untuk memberikan hak eksklusif kepada Hyundai dalam membangun dan mengoperasikan KIC sebagai zona ekonomi khusus.

Pada 26 Desember 2002, Hyundai Asan dan *Korea Land Corporation (KLC)* menandatangani perjanjian untuk membangun KIC. Selama tiga tahun masa persiapan, kedua belah pihak memastikan untuk dapat melintasi perbatasan ini secara bebas serta menetapkan aturan dasar dan peraturan tentang pajak, akuntansi, perbankan, dan tenaga kerja untuk diterapkan di KIC. Kemudian, setelah kunjungan pejabat Hyundai Asan, upacara peletakan dasar Taman Industri Kaesong berlangsung pada pertengahan tahun 2003 dan pekerjaan konstruksi dimulai pada bulan April 2004 (Wrobel 2014: 130).

Hyundai Asan dan *Korea Land Corporation* diberikan hak untuk terlibat dalam semua kegiatan pendanaan, *blueprint*, dan penjualan untuk melaksanakan

tahap pertama Kompleks Industri Kaesong. Mereka berencana untuk membangun kompleks industri ini dalam tiga tahap selama 8 tahun. Pada tahap pertama, 1 juta pyong (sekitar 330 ha) direncanakan untuk sebagian besar lokasi pabrik padat karya, yang terdiri dari produksi tekstil dan kulit serta barang-barang manufaktur umum yang sederhana. Pada tahap kedua, lebih dari 1,3 juta pyong (sekitar 430 ha) ditujukan untuk industri manufaktur dan jasa. Dan pada tahap ketiga 6,2 juta pyong (sekitar 2500 ha) untuk industri teknologi tinggi dan kimia. Tahap ini dirancang untuk membangun kompleks industri TI di area seluas satu juta pyong (330 ha). Kemudian industri seperti listrik dan elektronik, perangkat lunak, percetakan dan penerbitan, serta tekstil dan kulit harus diselesaikan di KIC (Wrobel, 2014: 133). Master plan dari pembangunan KIC dapat dilihat pada peta 3.2 dan tabel 3.1 dibawah ini.



Gambar 3.2 Master Plan of KIC (Sumber: Master plan of KIC, diakses dari <http://www.hyundai-asan.com/english/kaesong/plan01.jsp> , pada tanggal 13 Juli 2018).

Tabel 3.1 Master Plan of Kaesong Industrial Complex (as of 2006)

Klasifikasi Pembangunan	Pengembangan Wilayah		Perusahaan	Pekerja	Waktu Pembangunan
	Wilayah Industri	Wilayah Pendukung			
Fase Pertama	330 ha	1,635 ha (Urban Kaesong area)	300	70,000	2002-2007
Fase Kedua	490 ha	330 ha	700	130,000	2006-2009
Fase Ketiga	1,145 ha	655 ha	1,000	150,000	2008-2012
Expansion Zone	655 ha	1,635 ha			
Total	2,620 ha	4,255 ha	2,000	350,000	

(Sumber: *Economic and Environmental Studies* Vol 14, No.2 (30/2014), 125-148,. "Ten Years of Kaesong Industrial Complex: a brief history of the last economic cooperation project of the Korean peninsula". 2014, p. 133).

Dalam kerjasama ini, KIC secara fisik dan hukum dipisahkan dari Korea Utara. Jadi, hukum umum yang berlaku di Korea Utara tidak berlaku di Kawasan ini. Kawasan ini diberikan otonomi ekonominya tersendiri yang berpedoman dari prinsip-prinsip pasar. Dalam Kawasan Industri Kaesong terdapat beberapa perusahaan yang bergerak di berbagai bidang mulai dari bidang semikonduktor, bidang elektronika, bidang pengolahan bahan pangan dan lain-lainnya. Pada pertengahan 2006, 1.800 perusahaan telah diterapkan untuk masuk ke Kawasan Industri Kaesong dan telah meminta 5.112 hektare. Dari jumlah 1.800 perusahaan, 365 berada di mekanik manufaktur (suku cadang mobil, baut, ban, dll), 298 di pakaian, 261 di tekstil, 198 dalam elektronik, dan 112 dalam bahan kimia (karet, plastik, dll). (Nanto&Manyin, 2011: 7).

Ada 15 perusahaan yang beroperasi di Kompleks Industri Kaesong pada tahun 2006 dan produk-produk mereka termasuk Bucheon Industrial (kawat harness), Sonoko Cuisine Ware (peralatan dapur), SJ Tech (komponen semikonduktor kontainer), Shinwon (pakaian), Taesung Industri (wadah kosmetik), Samduk trading (alas kaki), Romanson (jam tangan dan perhiasan), hosan Ace (fan

oils), Magic Micro (rakitan lampu untuk monitor LCD), Munchang Co (pakaian), JY Solutec (komponen mobil dan cetakan), TS Precision Machinery (cetakan komponen semikonduktor), Yongin Elektronik (transformer, kumparan) dan JCCOM (komponen komunikasi), Daewha Fuel Pump (suku cadang kendaraan bermotor). (Nanto&Manyin,2011: 7)

Pada akhir tahun 2007 dicatat, sudah ada 60 perusahaan yang beroperasi dengan 80.000 pekerja di Kompleks Industri Kaesong. Perusahaan industri yang beroperasi disana tidak hanya membuat produksi dari material yang berasal dari Korea saja, namun mereka juga membuat produksi dari bahan baku impor. Produk jadi yang dihasilkan dari Kawasan Industri Kaesong ini antara lain tekstil, pakaian, tas, mainan, makanan (pembuat ginseng), minuman, peralatan elektronik, mesin dan lain sebagainya. Sehingga keuntungan yang didapat dari Kawasan Industrial Kaesong ini mencapai 187,78 juta dolar pada tahun 2007(Nam Sung-Wook, 2001: XIII). Dan mengalami kenaikan 1,2% pada tahun 2008. Kenaikan ini merupakan keberhasilan KIC sebagai pusat perdagangan yang juga mempengaruhi perdagangan antar Asia yang dipengaruhi oleh meningkatnya bisnis di Semenanjung Korea.

Pada tahun 2010, barang di kawasan Industri Kaesong diproduksi hingga mencapai \$323.300.000, hal ini mengalami peningkatan sekitar 25% dari tahun 2009. Sampai dengan akhir desember 2010, lebih separuh dari total kumulatif produksi ada pada tekstil dan pakaian, sekitar 20% ada di produk elektronik serta logam atau mesin, dan sekitar 10% dalam produk kimia.

Keberhasilan Kaesong juga bisa dilihat dari perkembangan kawasan industri ini yang sangat pesat, dimana pada tahun 2005 baru ada 11 perusahaan Korea Selatan yang memproduksi, jumlah tersebut meningkat hampir sepuluh kali lipat, lima tahun kemudian menjadi 109 perusahaan dan terus meningkat menjadi 123 perusahaan pada tahun 2013. Total produksi pun meningkat dari USD 1.491.000 ditahun 2005 menjadi USD 469.500.000 pada tahun 2012. Jumlah nilai produksi sejak 2005 hingga 2014 mencapai USD 2,6 miliar, dengan nilai ekspor sebesar USD 262 juta. Beberapa perusahaan ini dapat dilihat pada tabel 3.2. sebagai berikut :

Tabel 3.2 Perusahaan-Perusahaan di Kawasan Industri Kaesong

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Pengolahan logam	25
2.	Semi konduktor	19
3.	Transportasi	14
4.	Pengolahan bahan pangan	8
5.	Tekstil dan olahannya	7
6.	Konstruksi	14
7.	Mesin dan elektronika	24
8.	Lain-lain	13

(Sumber : Mark L. Mayin, 2015, *The Kaesong : North and South Korean Industrial Complex*, Seoul : yonhap Publishing, chapter iv).

Jumlah pekerja Utara pada Kawasan Industri Kaesong pada tahun 2015 mencapai 54.357 orang, jumlah pekerja yang ada di Kaesong terus meningkat seiring berjalannya waktu. Dengan terus bertambahnya jumlah pekerja yang ada, hal ini menunjukkan adanya keuntungan yang menjanjikan bagi pekerja yang bekerja di Kaesong. Pada data Kementerian Unifikasi Korea Selatan statistik jumlah pekerja Korea Utara dan Korea Selatan selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel 3.3. dibawah ini:

Tabel 3.3 Jumlah Pekerja di Kawasan Industri Kaesong

Klasifikasi	2005	2008	2009	2010	2012	2013	2015
Utara	6.013	38.931	42.261	46.284	53.448	53.000	54.357
Selatan	507	1.055	935	804	786	820	809

(Sumber: Amri Hakim. Studi Eksplanatif proses integrasi Korea dalam teori Liberal fungsional internasional society, [S.L.], V.3, N.1, p. 53-68, Halaman 16).

Peningkatan kerjasama di Semenanjung Korea ini mulai membawakan hasil, dan memberikan keuntungan bagi kedua pihak. Produk yang dibuat oleh perusahaan yang pengerjaannya 60% di proses dan terbuat dari bahan yang dibawa

dari luar, maka kemudian produksi barang tersebut di beri label “Made in Korea”. Meskipun Kaesong merupakan zona industri diantara dua negara yang sedang dalam kondisi bertikai, namun Kaesong tetap bisa mempertahankan perannya sebagai keberhasilan kerjasama ekonomi antara Korea Selatan dan Korea Utara.

Maka tujuan dari KIC adalah untuk mengembangkan sebuah taman industri dimana bisnis Korea Selatan bisa memproduksi produk yang menggunakan tenaga kerja dari Korea Utara, memberikan peluang bagi Korea Utara agar dapat meliberalisasi dan reformasi ekonominya, dan meredakan ketegangan di DMZ. (The Kaesong North-South Korean Industrial Complex). Dengan adanya modal, teknologi, dan juga sumber-sumber alam dari pihak Korea Selatan dan Tenaga Kerja dari pihak Korea Utara, kerjasama ekonomi antar kedua Korea ini diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Selain keuntungan, adanya kerjasama ini juga tentu saja akan menghemat waktu untuk memproduksi barang dan biaya pengangkutannya ke pasar luar negeri seperti ke pasar Negara Rusia, Eropa, Cina, maupun Asia Timur. Dengan diadakannya kegiatan kerjasama ekonomi antar-Korea ini tentu saja juga akan sangat berguna untuk memulihkan ekonomi Korea Utara yang sedang dalam kondisi buruk.

3.3. Ketegangan Hubungan Antara Korea Selatan dan Korea Utara

Korea Selatan dan Korea Utara merupakan dua negara di wilayah Asia Timur yang menjadi simbol perseteruan ideologi antara Barat (liberalis-kapitalis) dan Timur (sosialis-komunis) hingga saat ini. Ketika Uni Soviet runtuh pada masa era kepemimpinan Mikheil Gorbachev akibat krisis ekonomi yang sudah sedemikian parah yang berujung pada runtuhnya negara itu, perseteruan ideologi masih dapat dirasakan di beberapa negara, diantaranya adalah Korea Utara dan Korea Selatan. Menurut R Crandall yang merupakan analis politik keamanan Asia Timur dari kajian *Peace and Freedom Institute, Harvard University* menyatakan bahwa :

“...ketika dunia dihadapkan dengan berbagai isu yang lebih penting, diantaranya terorisme, human security hingga persoalan-persoalan krisis

energi, terdapat masalah yang sebenarnya tidak lagi relevan. Adalah masalah konflik antara Korea Selatan dan Korea Utara, bagi sebagian kalangan mempertanyakan tentang mengapa Korea Utara berkembang sebagai negara tertutup dan bagaimana negara itu hidup tanpa Korea Selatan.”(Crandall,2015:7)

Memanasnya hubungan Korea Selatan dan Korea Utara ternyata memiliki korelasi dengan dinamika yang berkembang dan kondisi ini ternyata sudah berlangsung lama. Setelah perang dunia II, pada tahun 1945, Korea dibagi menjadi Korea Utara dan Korea Selatan yang dikenal dengan Paralel 38. Rusia mengambil kendali atas Korea Utara dan Amerika Serikat mengambil kendali atas Korea Selatan (Debora, 2017).

Pada tahun 1998, sebuah kebijakan dibuat oleh Presiden Kim Dae Jung yang dinamai *Sunshine Policy*. Kebijakan diplomasi milik Kim Dae Jung ini di gagas untuk menghadapi Korea Utara. Kebijakan yang lebih mengedepankan pendekatan secara damai dengan menjalin kerjasama di bidang ekonomi dan kemanusiaan serta memajukan rekonsiliasi untuk mengarah pada penyatuan korea kembali (Sugianto, 2015). Pertemuan tingkat tinggi pada juni 2000 adalah yang pertama kalinya dilakukan oleh Korea Utara dan Korea Selatan. Termasuk juga pertama kalinya kunjungan kenegaraan yang dilakukan oleh presiden Korea Selatan Kim Dae-jung ke Korea Utara. Selain itu, Korea Utara juga membangun kembali hubungan diplomatik dengan beberapa negara barat dan berjanji untuk melakukan memoratorium pengujian rudal (Debora, 2017).

Perkembangan persenjataan nuklir yang pesat serta seringnya provokasi percobaan senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara menjadikan Korea Selatan merasa terancam akan hal tersebut. Hal ini tentu coba di respon oleh Korea Selatan agar bisa mengamankan negara serta mencegah ancaman dari provokasi Korea Utara. Korea Selatan yang telah lama merespon agresivitas Korea Utara dengan mengeluarkan berbagai kebijakan tentunya telah banyak berdampak terhadap naik turunnya tensi hubungan antara kedua negara ini. Keharmonisan Korea Utara dan Korea Selatan hanya berlangsung sebentar. Setelah Presiden Korea Selatan, Kim Dae Jung turun tahta dan digantikan oleh Presiden Roh Moo-Hyun (2003-2008) hubungan keduanya menjadi renggang kembali. Pada masa Roh Moo-

Hyun haluan kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara menjadi sedikit berubah. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan sinar matahari (*Sunshine Policy*) tidak lagi didukung oleh semua pihak karena pada saat itu banyak rakyat Korea Selatan yang menganggap kebijakan tersebut hanya sebagai *mission impossible* Kim Dae Jung. Yang kemudian membuat *Sunshine Policy* digantikan oleh kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan masa Roh Moo-Hyun.

Puncak penurunan hubungan kedua negara terlihat pada era kepemimpinan Lee Myung Bak. Lee yang menerapkan kebijakan yang cenderung konfrontatif membuat hubungan kedua negara yang sebelumnya sudah mulai membaik pada masa kepemimpinan Kim Dae Jung dan Roh Myu-Hun berubah secara drastis pada masa kepemimpinan Lee Myung Bak. Semenjak Presiden Lee Myung Bak (2008-2013) memimpin Korsel, hubungan antara kedua Korea yang telah membaik kembali memanas. Lee Myung Bak memiliki kebijakan dan sikap yang berbeda dari para pemimpin terdahulunya dalam merespon sikap provokasi senjata nuklir Korea Utara. Di bawah kebijakan baru pada masa kepemimpinan Lee Myung bak, Korea Selatan akan memberikan bantuan ekonomi bagi Korea Utara selama 1 dasawarsa, yang bertujuan untuk membantu meningkatkan pendapatan perkapita Korea Utara hingga 3000 dollar, namun Presiden Lee meminta agar Korea Utara mengentikan semua program nuklirnya. Kebijakan tersebut didasari karena ketakutan Korea Selatan akan adanya program senjata nuklir dari Korut. Sehingga Lee Myung Bak menerapkan kebijakan yang berbeda dari pemimpin sebelumnya. Tidak adanya kata sepakat dalam *six party talk* membuat Korea Utara tetap menjalankan proyek pengayaan uranium yang kemudian memunculkan tekanan dari Presiden Korea Selatan, Lee Myung Bak, melalui kebijakan-kebijakan yang diputuskannya yang berkaitan dengan bantuan terhadap Korea Utara.

Six Party Talks merupakan sebuah pembicaraan multilateral yang dilakukan oleh enam negara yaitu Amerika Serikat, Rusia, Cina, Jepang, Korea Selatan dan Korea Utara. Tujuan utama dari rundingan ini adalah agar Korea Utara melakukan denuklirisasi. Dalam mencapai tujuan utamanya tersebut, *six party talks* melakukan serangkaian negosiasi panjang yang berlangsung dari tahun 2003 hingga 2009, rundingan ini memberikan kontribusi bagi perkembangan isu senjata nuklir Korea

Utara. Hal ini terbukti dari beberapa kesepakatan yang telah dicapai dalam rundingan ini. Sejak pertama dibentuk, *six party talks* diharapkan mampu mendorong penyelesaian masalah krisis senjata nuklir Korea Utara dalam bentuk pembicaraan multilateral yang bersifat damai melalui dialog. Namun, dalam kenyataannya peran *six party talks* ini tidak menghasilkan efek yang signifikan dalam mewujudkan denuklirisasi Korea Utara. Hal ini terlihat dari pencapaian yang dihasilkan melalui rundingan ini hanya berlaku sementara dan bersifat jangka pendek (Inter-Korean Dialogue, 2009).

Tidak tercapainya kata sepakat pada rundingan tersebut, membuat Korea Selatan menjalin kerjasama militer internasional dengan negara lain salah satunya dengan Amerika Serikat pada tahun 2008, Korea Selatan mengumumkan keikutsertaannya secara penuh dalam gagasan pencegahan penyebaran senjata pemusnah massal (nuklir) yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Pada tahun yang sama juga diadakan latihan gabungan antara Korea Selatan dan tentara Amerika Serikat yang berlangsung selama 12 hari. Korea Utara menganggap bahwa latihan gabungan tersebut sebagai sebuah ancaman dan secara rutin mengecam latihan militer gabungan tersebut, namun pihak Korea Selatan sendiri tidak terlalu peduli dengan segala peringatan keras dari Korea Utara karena menurut mereka, latihan gabungan tersebut hanya bertujuan untuk pertahanan. Menyusul ketegangan yang terus terjadi antara kedua negara pada November 2010, kementerian reunifikasi Korea secara resmi mengatakan bahwa *Sunshine Policy* telah gagal dalam menjalankan fungsinya. Hal ini kembali membuat hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan semakin memburuk. Korea Selatan mulai menerapkan kebijakan-kebijakan yang konfrontatif, karena selain nuklir Korea Utara, kekuatan militer yang dimiliki oleh Korea Utara juga jauh lebih kuat dibandingkan dengan Korea Selatan.

Korea Utara memiliki kekuatan militer yang kuat. Angkatan darat Korea Utara menempati posisi kelima terbesar di dunia, diperkirakan sebanyak 1,21 juta personel tentara, dengan kira-kira 20% pria berusia 17–54 tahun tergabung dalam angkatan darat negara tersebut. Tingkat persentase personel militer per kapita Korea Utara merupakan yang tertinggi di dunia., dengan sekitar 1 serdadu yang

terdaftar untuk setiap 25 warga negara. Hingga tahun 2016 gambaran kekuatan militer Korea Utara dapat dilihat pada tabel 3.4. sebagai berikut:

Tabel 3.4. Kekuatan Militer Korea Utara Tahun 2005

No.	Kategori	Jumlah
1.	Personel aktif	1.000.000 personel
2.	Tank	3.500 buah
3.	Artileri	21.100 unit
4.	Kapal Selam	72 unit
5.	Freecat	3 unit
6.	Pesawat tempur	523 unit

(Sumber : "Perbandingan Militer Dua Korea", dalam <http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/05/ingin-tahu-perbandingan-kekuatan-militer-dari-dua-korea>, diakses pada tanggal 23 September 2017).

Dikutip dari situs dw bahwa Korea Utara memiliki jumlah tentara reguler sebanyak 700.000 orang, dan hampir 4,5 juta tentara cadangan, hal ini menunjukkan bahwa hampir seperlima rakyat Korea Utara bergabung dalam bidang militer. Semua pria di negara tersebut memiliki kewajiban untuk mengikuti pendidikan militer dalam bentuk apapun. Dengan demikian, personel militer Korea Utara berjumlah dua kali lebih besar daripada yang dimiliki oleh Korea Selatan. Kemudian menurut Global Firepower Index 2017 bahwa Korea Utara mempunyai banyak alat utama sistem pertahanan seperti 76 kapal selam, 5.025 panser, serta 458 jet tempur. Dari tempat pusat komando militer yang dimiliki oleh Korea Utara, Kim Jong Un dapat memerintahkan persiapan peluncuran roket yang sebagian bisa dimuati hulu ledak nuklir, untuk menyerang Amerika Serikat dan Korea Selatan.

Masih dari situs yang sama diketahui bahwa Korea Utara memiliki strategi militer dengan cara menyusupkan agen rahasia dan menyabotase barisan belakang musuh pada saat perang. Perlengkapan yang dimiliki oleh tentara Korea Utara meliputi, 17,900 artileri (termasuk mortir), 11,000 senjata pertahanan udara; 4,060 tank, 2,500 APC; 1,748 pesawat tempur dan 915 kapal perang. Perlengkapan tersebut merupakan hasil dari sisa-sisa perang dunia II, umumnya teknologi Perang Dingin yang terproliferasi atau bekas senjata dari Uni Soviet.

Korea Utara juga menjual misil balistik dan peralatan militernya ke berbagai negara. Pada April 2009, PBB menyatakan bahwa Perusahaan Perdagangan, Pembangunan dan Pertambangan Korea (KOMID) sebagai agen penjual senjata utama Korea Utara dan pengeksport terbesar misil balistik dan senjata konvensional. PBB juga menyebut Korea Ryonbong sebagai penyokong penjualan segala hal yang berhubungan dengan militer Korea Utara.

Korea Utara dilaporkan telah melakukan uji coba sistem pertahanan udara terbaru mereka. Uji coba ini, menurut laporan media pemerintah Korut, KCNA, disaksikan langsung oleh Kim Jong-un. KCNA melaporkan, Jong-un langsung memerintahkan produksi secara massal sistem pertahanan udara tersebut, dan menyebarkannya di seluruh wilayah Korut, khususnya di wilayah perbatasan, tidak lama setelah Jong-un menyaksikan uji coba itu. Sistem senjata ini, yang kemampuan operasinya telah diverifikasi secara menyeluruh, harus diproduksi secara massal untuk ditempatkan di seluruh negeri, sehingga benar-benar merusak impian liar musuh untuk menguasai wilayah udara. (Maulana, 2017)

Keberadaan Korea Utara sebagai ancaman hubungan Jepang dan Amerika Serikat juga dapat dilihat dari sistem persenjataan konvensional seperti artileri. Saat ini (2016) Korea Utara memiliki sebanyak 21,000 senjata artileri berat jarak jauh yang sebagian besar berdaya jelajah tinggi dan mampu mencapai Seoul, Ibukota Korea selatan. Terlepas dari jumlah serdadu dan artileri yang dimiliki oleh Korea Utara, ancaman terbesar yang dimiliki oleh militer Korea Utara adalah sistem peluru kendali (rudal) berhulu ledak nuklir yang dikembangkan sejak dekade 1970an dengan mengandalkan desain rudal Scud. Oleh sebab itu, Korut kini memiliki tiga tipe peluru kendali yang sangat berbahaya dan ditakuti oleh Negara-negara disekitarnya, yang salah satunya berdaya jelajah 8000 kilometer yaitu Taepodong 2. Dengan Taepodong 2 Pyongyang dapat menghantam Kanada, Eropa dan Amerika Serikat.

Oleh karena kekuatan militer yang dimiliki oleh Korea Utara, Korea Selatan sempat melakukan beberapa kali latihan militer gabungan bersama Amerika Serikat, salah satunya pada 11 Maret 2013 sampai dengan 30 April 2013. Dengan adanya latihan militer gabungan ini maka semakin membuat hubungan antara kedua

negara semakin memanas. Latihan yang melibatkan angkatan darat, laut dan udara ini diberi nama sandi “*Foal Eagle*” dan “*Key Resolve*”. Latihan gabungan tersebut digelar di pyeonchang, sekitar 180 kilometer dari Ibukota Korea Selatan. Hubungan yang kembali memanas berdampak pada penutupan wilayah industri Kaesong pada tahun 2013 oleh Korea Utara karena mereka menganggap bahwa latihan gabungan yang terang-terangan dilakukan oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat adalah sebagai bentuk ancaman invasi dan tindakan provokasi untuk menyerang Pyongyang. Tapi tidak lama kemudian kawasan ini kembali dibuka oleh Korea Utara.

CNN mengabarkan bahwa memanasnya hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara ternyata juga dipengaruhi oleh sikap impresif Korea Utara dalam mengembangkan misil jarak jauh. Sebelum melakukan uji coba rudal ini, Korea Utara terlebih dahulu melakukan uji coba mesin. Uji coba mesin ini menjadi peristiwa sejarah lahirnya industri roket nasional. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un juga menyatakan bahwa hal ini adalah kemajuan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dibuat oleh industri pertahanan negara. Uji coba mesin tersebut bertepatan dengan tur Asia dari Menteri Luar Negeri AS, Rex Tillerson yang meliputi Jepang, Korea Selatan dan Cina. Bahkan ancaman nuklir Korea Utara menjadi salah satu isu utama yang dibahas dalam kunjungan tersebut. pada awal tahun 2016. Korea Selatan juga melaporkan jika Korea Utara telah melepaskan rudal balistik. Berbagai uji rudal serta nuklir Korea Utara serta pernyataan agresif menyebabkan kecemasan dan kemarahan bagi negara kawasan.

Memanasnya hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara juga dapat dilihat dari terjadinya beberapa insiden dari tahun ke tahun yang terus menunjukkan tren peningkatan. Insiden ini meliputi kasus penembakan, ketegangan di wilayah perbatasan, pelanggaran lintas batas dan beberapa kasus lainnya. Gambaran tentang frekuensi insiden ini dapat dilihat pada tabel 3.5. sebagai berikut :

Tabel 3.5 Frekuensi Insiden Antara Korea Selatan dan Korea Utara Tahun 1990-2015.

No.	Tahun	Jumlah Insiden
1.	1990 – 1995	8
2.	1995 – 2000	12
3.	2000 – 2005	21
4.	2005 – 2010	28
5.	2010 – 2015	30

(Sumber : Diolah dari Reinhard Drifte, “Japan Policy Toward in the South China Sea”, *The Jurnal of Peace Research Institute of Frankfurt*, Report, 140. Frankfurt, 2016, hal.27).

Tabel di atas menjelaskan bahwa berbagai insiden yang terjadi kemudian mendorong pemerintah Korea Selatan untuk berupaya menekankan pihak Korea Utara agar dapat lebih mengontrol sikap impresifismenya. Salah satunya dengan merevitalisasi kawasan industri Kaesong. Penutupan wilayah industri kaesong sebagai resaksi Korea Selatan atas peningkatan percobaan senjata nuklir Korea Utara akan dibahas di bab selanjutnya (Bab IV).

BAB 5. KESIMPULAN

Melalui uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa konflik di Semenanjung Korea dan ketegangan yang menyertainya tidak dapat dipisahkan dari isu nuklir Korea Utara. Hal utama penyebab situasi keamanan di Semenanjung Korea kerap memanas adalah status hubungan Korea Selatan dan Korea Utara yang secara teknis masih dalam keadaan perang, perang Korea pada tahun 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai. Korea Selatan dan Korea Utara merupakan dua negara di wilayah Asia Timur yang menjadi simbol perseteruan antara ideologi barat (Liberalis-Kapitalis) dan Timur (Sosialis-Komunis), dimana ketika isu ini tidak lagi populer pasca runtuhnya Uni Soviet pada akhir tahun 1990, namun perseteruan ini masih tetap berkembang pada dua negara tersebut. Situasi demikian mengakibatkan tidak adanya norma yang disepakati untuk mengatur hubungan antara kedua negara dan menyebabkan adanya rasa kurang saling percaya antara kedua negara sebangsa itu hingga sekarang. Hal ini membuat reunifikasi antara Korea Selatan dan Korea Utara semakin sulit untuk terjadi.

Perkembangan hubungan Korea Selatan dan Korea Utara yang cenderung memburuk pada tahun 2003 ternyata masih menyisahkan beberapa proyek kerjasama pada bidang ekonomi, khususnya pada sektor manufaktur yaitu kerjasama di kawasan industri Kaesong. Kawasan ini didirikan pada tahun 2002 dan terletak di wilayah Kaesong, Korea Utara. Pada kawasan industri ini terdapat ratusan perusahaan Korea Selatan yang juga mempekerjakan masyarakat Korea Utara. Kawasan Industri Kaesong merupakan wilayah administrasi khusus yang terhubung dengan infrastruktur jalan raya dan kereta api antara Korea Selatan dan Korea Utara. Pada tahun 2016, pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk menutup kawasan industri ini. Hal ini dikarenakan tindakan provokatif yang kerap dilakukan oleh Korea Utara dalam uji coba senjata nuklirnya. Kekhawatiran negara-

negara di kawasan cukup beralasan jika dikaitkan dengan kemampuan daya jangkau rudal Korea Utara yang mengalami kemajuan

Penghentian kerjasama ekonomi ini memberi bukti bahwa Korea Selatan menyatakan sikap seriusnya terhadap provokasi uji coba senjata nuklir Korea Utara. Berbagai persoalan yang berkembang selama ini, belum pernah memicu reaksi keras dari Korea Selatan, namun setelah uji coba senjata nuklir Korea Utara yang ke-empat pada tanggal 6 Januari 2016 lalu, Korea Selatan memutuskan untuk menutup wilayah industri ini secara total, baik dari sistem operasional, sumberdaya manusia, hingga akses ke lokasi perindustrian berat. Adanya sanksi ekonomi dalam bentuk penghentian kerjasama di wilayah industri Kaesong ini memberikan dampak yang serius bagi perekonomian Korea Utara, sehingga jika ditutup secara sepihak ini akan memberikan pengaruh buruk bagi perekonomian negara ini. Kerjasama pada kawasan ini diperkirakan telah menyumbang sekitar 20%-30% dari total ekspor Korea Utara. Dan menyumbangkan total sebesar 22% kepada pemasukan nasional negara ini. Dengan ditutupnya kawasan ini maka Korea Utara akan kehilangan sekitar 22% dari total pemasukan nasionalnya. Selain itu, penutupan Kaesong juga akan mempengaruhi meningkatnya pengangguran di kawasan ini, hal ini dikarenakan terdapat lebih dari 50.000 tenaga kerja Korea Utara yang bekerja di Kawasan Industri ini yang otomatis akan kehilangan pekerjaannya jika kerjasama ini dihentikan. Kemudian pada bidang manufaktur dengan penutupan Kaesong maka Korea Utara tidak akan lagi dapat memproduksi beberapa produk dan kebutuhan dasar, termasuk penghangat ruangan ataupun pengolahan bahan pangan, khususnya jagung, padi, dan gandum. Selain itu masyarakat Korea Utara yang tinggal di sekitar Kaesong dan beberapa wilayah penyangga lainnya, diantaranya Haeju, Kungang juga akan menghadapi pemutusan listrik dan air bersih. Pemutusan hubungan kerjasama di kawasan industri kaesong ini sebagai bentuk sanksi terhadap Korea Utara, agar Korea Utara lebih kooperatif lagi dalam pengembangan senjata nuklirnya dan menjaga agar Semenanjung Korea tetap dalam keadaan kondusif. Namun, dalam kenyataannya pasca penutupan wilayah industri Kaesong ini, Korea Utara masih terus melakukan uji coba persenjataannya. Hal ini dapat dilihat dari percobaan kelima dan ke-enam yang dilakukan oleh Korea

Utara dengan skala yang lebih besar daripada sebelumnya. Namun pada bulan Januari 2018, terjadi pertemuan antara pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden Korea Selatan Moon Jae In yang membawa angin perdamaian kepada dua Korea tersebut. Dalam pertemuan itu Kim Jong Un dan Moon Jae In sepakat untuk berdamai dan Korea Utara juga bersedia untuk menanggukkan uji coba senjata nuklir mereka. Kedua pemimpin setuju untuk mengupayakan perdamaian permanen antara kedua Korea dan mewujudkan wilayah Semenanjung Korea yang bebas dari senjata nuklir.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku :

- Athlaus, C and P. Davis et, all. 2007. *The Australian Policy Handbook : Edisi Keempat*. Sydney: Allen and Unwin Press.
- Barston, R.P. 1988. *Modern Diplomacy*. London: Longman Group UK Limited.
- Beridge, G.E. 2015. *Diplomacy: Theory and Practice*. London and New York: Springer Publishing.
- Caroll, J.N and S. Ambert. 2016. *The Prospect of Reunification on Korean*. London and New York: Palgraff University Press.
- Cassel, C dan G. Symon(ed). 1994. *Qualitative Methods in Organizational Research*. London: Sage Publications.
- Chubb, D.L. 2015. *The Two Korean: Politic, Economy and Society*. London and New York: Routledge Publishing.
- Edward, P.M. 2010. *Historical Dictionary of Korea War*. Lanham and Toronto: Scarecrow Publishing.
- Emilia, R. 2013. *Praktek Diplomasi*. Jakarta: Baduose Media.
- George, A, dan W. Simon. 1994. *The Limit of Coercive Diplomacy*. Boulder-Colorado: Westview Press.
- Holsti, K.J, dan W. Juanda. 1992. *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis*. Bandung: Binacipta
- Hwang, K.T dan G.S Kwon. 2016. *Between Two Korean: From Friction to Reunification Issue*. New York: Springer Publisher.
- Kamasa, F. 2016. *Perang Korea*. Yogyakarta: Narasi
- Kaufman, S. 2015. *The UN Role on Korean Conflict*. New York: Springer Publisher.
- Kerriegger, L.S, dan K. Neill. 1998. *World History: Perspective on The Past (Last Edition)*. New York: Houghton Mifflin College Division Publishing.
- Lan, N.J. 1962. *The History and Civilization of East Asian*. New York: Cornell University.

- Marbun, BN. 2005. *Kamus Politik Edisi Baru*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Moore, G. J. 2014. *North Korean Nuclear Operationality : Regional Security and Non Proliferation*. Baltimore: John Hopkins University Press.
- Park, W. 2014. *Dollar Battle Gami*. San Diego-California: Thunder Bay Press.
- Shung C.K and M.D. Cohen. 2017. *North Korean and Nuclear Weapon : Entering New Era Deterence*. Washington DC: Goerge Washington Publishing.
- Sing, L.H. 2011. *Japan in War Pacific*. London and New York: Routledge.
- Su, S. dan V. Doixa. 2012. *History of Japan : From War Pacific to Millenial Age*. Washington DC: Vrookings Institute Press.
- Suharman. 2006. *Sejarah Jepang Modernisasi Sampai Kontemporer*. Yogyakarta: Kaliwangi Offset.
- Suryokusumo, S. 2004. *Praktik Diplomasi*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Yin, R.K. 1996. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Yun, S. and S. Jaesuk. 2009. *South Korean and Debt Crisis: The Creation of Neoliberal Welfare Security*. London: Duke University Press.

2. Jurnal :

- Gyu, P.U. 2017. South Korean Trade Today: Kaesong Issue Between Reconciliation Disorder. *Journal of Economy and Public Policy*. Vol III. University of Cambridge, New York.
- Iniss, K.J. 2015. The North Korean Nuclear Challenges. *Congress National Journal Service*. Vol. IX. New York.
- Manyin, M.E. & D.K. Nanto. 2011. The Kaesong North-South Korean Industrial Complex. *Congressional Research Service*: 1-25.
- North Korean Review. 2016. New Foreign Policy and Foreign Relations. *North Korean People Supreme Assembly*: Chapter IV.
- Wo, J.E. 2017. Focus on: South Korean Television Series. Seoul and New York: Sunny Press.

Wrobel, R.M. 2014. Ten Years of Kaesong Industrial Complex: a brief history of the last economic cooperation project of the Korean Peninsula. *Economic and Environmental Studies*. Vol 14, No.2: 125-148.

3. Internet (*web site*) :

Ajinugroho, S. 2018. Ada Udang di Balik Batu, Terungkap Alasan Korea Utara Melunak dan Berdamai dengan Korea Selatan. Grid ID: <http://www.grid.id/read/04312932/ada-udang-di-balik-batu-terungkap-alasan-korea-utara-melunak-dan-berdamai-dengan-korea-selatan?page=all> diakses pada tanggal 22 Oktober 2018

Armandhanu, D. 2016. AS Ganjar Sanksi Baru Terhadap Korut Usai Uji Nuklir. CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160317104950-113-117985/as-ganjar-sanksi-baru-terhadap-korut-usai-uji-nuklir?> Diakses pada Agustus 2018.

Bahasa Korea. 2016. Mempelajari Budaya: Mempelajari Bahasa. Dari: <http://bahasa-korea.com/> diakses pada tanggal 25 Agustus 2018.

BBC. 2016. What is The Kaesong Industrial Complex?. BBC News: <https://www.bbc.com/news/business-22011178> Diakses pada tanggal 18 September 2017.

BBC. 2017. Profile: IAEA, The Nuclear Watchdog. Dari: <https://www.bbc.com/news/world-europe-17117069> diakses pada tanggal 25 Agustus 2018.

Borger, J. 2018. North Korea Sanctions: Donald Trump Announces 'Largest Ever' Package. The Guardian: <https://www.theguardian.com/us-news/2018/feb/23/north-korea-sanctions-trump-announces-largest-ever-package> diakses pada tanggal 25 Agustus 2018.

Central Intelligence Agency. 2017. East and Southeast Asia: North Korean. dari: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kn.html> diakses pada tanggal 26 Juli 2018.

Debora, Y. 2017. Perseteruan Abadi Korea Utara – Korea Selatan. Tirto.id: <https://tirto.id/perseteruan-abadi-korea-utara--korea-selatan-clqs> diakses pada Juni 2018. Diakses pada juni 2018

Dixit, A. 2018. IAEA Ready to Play Essential Verification on North Korean, Director General Tells Board of Governors. IAEA: <https://www.iaea.org/newscenter/news/iaea-ready-to-play-essential->

verification-role-in-north-korea-director-general-tells-board-of-governors diakses pada tanggal 18 Agustus 2018.

- Editors. 2009. Korean War : Fact and Summary. History: <https://www.history.com/topics/korean-war> diakses pada tanggal 26 Juli 2018.
- European Council. 2018. EU Restrictive Measures Against North Korea. Dari: <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/history-north-korea/> diakses pada tanggal 25 Agustus 2018
- Evan. 2017. Berbagai Sanksi PBB untuk Korea Utara dalam 11 Tahun. Tempo: <https://dunia.tempo.co/read/1138771/bertemu-menlu-arab-saudi-jokowi-tanya-soal-jamal-khashoggi> diakses pada Juli 2018.
- Global Security. Tanpa tahun. North Korean : Nuclear Weapons Program, dari: <https://www.globalsecurity.org/wmd/world/dprk/nuke.htm> diakses pada tanggal 18 Agustus 2018.
- Hyeyoon, C. 2017. What Will Happen to Kaesong Industrial Complex?. Korea Expose: <https://www.koreaexpose.com/what-will-happen-kaesong-industrial-complex/> Diakses pada tanggal 19 September 2017.
- IAEA. 2016. IAEA and DPRK: Chronology of Key Events. Dari: <https://www.iaea.org/newscenter/focus/dprk/chronology-of-key-events> diakses pada Juni 2018
- Index Mundi. 2018. North Korean Country Profile. CIA World Factbook: https://www.indexmundi.com/north_korea/ diakses pada tanggal 26 Juli 2018.
- Kim, S. 2018. South Korea Minister Says Military Option ‘Unacceptable’ on North Korea Crisis. Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-davos-meeting-southkorea-military/south-korea-minister-says-military-option-unacceptable-on-north-korea-crisis-idUSKBN1FE21K> diakses pada tanggal 25 Agustus 2018.
- Korean Culture Center. Tanpa tahun. Tentang Korea. Dari: <http://id.korean-culture.org/id/142/korea/43> diakses pada tanggal 24 Juli 2018.
- Lee, W. 2018. South Korea Seeks Exemption to Sanctions on North. UPI: <https://www.upi.com/South-Korea-seeks-exemption-to-sanctions-on-North/3201532313387/> diakses pada 18 Agustus 2018.
- Liberty in North Korea. Tanpa tahun. History of North Korean. Dari: <https://www.libertyinnorthkorea.org/learn-north-korea-history/> diakses pada tanggal 26 Juli 2018.

- Marbun, J. 2014. Warga Korea Utara Terus Alami Penindasan HAM. *Republika*: <https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/14/08/22/nao663-warga-korea-utara-terus-alami-penindasan-ham> diakses pada tanggal 25 Agustus 2018.
- Maulana, V. 2017. Disaksikan Jong-Un, Korut Uji Coba Sistem Pertahanan Udara Baru. *Sindo News*: <https://international.sindonews.com/read/1208680/40/disaksikan-jong-un-korut-uji-coba-sistem-pertahanan-udara-baru-1495948610> diakses pada Mei 2018
- McCurry, J. 2016. *Seoul Shut Down Joint North-South Korean Industrial Complex*. *The Guardian*: <https://www.theguardian.com/world/2016/feb/10/seoul-shuts-down-joint-north-south-korea-industrial-complex-kaesong> Diakses pada tanggal 18 Agustus 2018.
- Millar, J. 2018. North Korea vs USA: Tale of The Tape- How Kim and Trump's War Chests Compare. *Express*: <https://www.express.co.uk/news/world/895481/north-korea-attack-usa-war-missiles-army-kim-jong-un-donald-trump> diakses pada tanggal 25 Agustus 2018
- Muhaimin. 2017. Data Uji Coba Nuklir Korut dari Masa ke Masa. *Sindo News*: <https://international.sindonews.com/read/1236457/40/data-uji-coba-nuklir-korut-dari-masa-ke-masa-1504513133/15> diakses pada tanggal 22 Oktober 2018
- Nuclear Threat Initiative. 2018. North Korean : Strategic Nuclear Threat. *NTI*: <http://www.nti.org/learn/countries/north-korea/> diakses pada tanggal 3 Mei 2018.
- OECD. 2018. Korean: Forecast and Statistic. dari: <http://www.oecd.org/economy/korea-economic-forecast-summary.htm> diakses pada tanggal 22 Mei 2018.
- Pham, P. 2015. South Korea: The Seoul of The World's Economy. *Forbes*: <https://www.forbes.com/sites/peterpham/2015/09/09/south-korea-the-seoul-of-the-worlds-economy/#40c1236342c0> diakses pada tanggal 22 Mei 2018.
- Rita, M. 2016. Ini 8 Jenis Sanksi Terberat PBB untuk Korea Utara. *Tempo*: <https://dunia.tempo.co/read/750228/ini-8-jenis-sanksi-terberat-pbb-untuk-korea-utara/full&view=ok> diakses pada Agustus 2018
- Ryall, J. 2017. North Korea Snubs South, Restarts Kaesong Industrial Park. *DW*: <https://www.dw.com/en/north-korea-snubs-south-restarts-kaesong-industrial-park/a-40872227> Diakses pada tanggal 8 Mei 2018

- Sang-Hun, C. 2016. South Korea to Shut Joint Factory Park, Kaesong, Over Nuclear Test and Rocket. The New York Times: <https://www.nytimes.com/2016/02/11/world/asia/north-south-korea-kaesong.html?ref=collection%2Ftimestopic%2FKaesong> Diakses pada tanggal 17 September 2017.
- United Nations. 1950. Security Council Resolutions- 1950. Dari: <http://www.un.org/docs/scres/try/scres50.htm> Diakses pada tanggal 19 September 2017.
- World Atlas. 2017. North Korean Large Color Maps. dari: <https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/lgcolor/kpcolor.htm> diakses pada tanggal 22 Mei 2018.
- World Atlas. 2017. South Korean Large Color Maps. Dari: <https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/lgcolor/krcolor.htm> diakses pada tanggal 22 Mei 2018
- World Population Review. 2018. South Korea Populations 2018. dari: <http://worldpopulationreview.com/countries/south-korea-population/> diakses pada tanggal 22 Mei 2018.